



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 ini disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan deskripsi menyeluruh terhadap capaian kinerja secara periode triwulan sebagai alat analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Januari 2026

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAUT' at the top and 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'Lollan Panjaitan' and the NIP number '19710125 199703 1 001' are printed.

Lollan Panjaitan
NIP. 19710125 199703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
C. Sumber Daya Manusia	I - 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
A. Perencanaan Strategis.....	II - 1
B. Perjanjian Kinerja	II - 17
C. Reviu Perjanjian Kinerja	II - 17
BAB III CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	III - 1
A. Capaian Kinerja.....	III - 1
B. Kontribusi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 4
C. Realisasi Anggaran	III - 112
BAB IV PENUTUP	IV - 1
A. Kesimpulan	IV - 1
B. Langkah Kedepan	IV - 6



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang yang lebih difokuskan pada keuangan, hal itu menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut dapat menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai langkah maju diperlukan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja, dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan atas pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disebut Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima.



Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



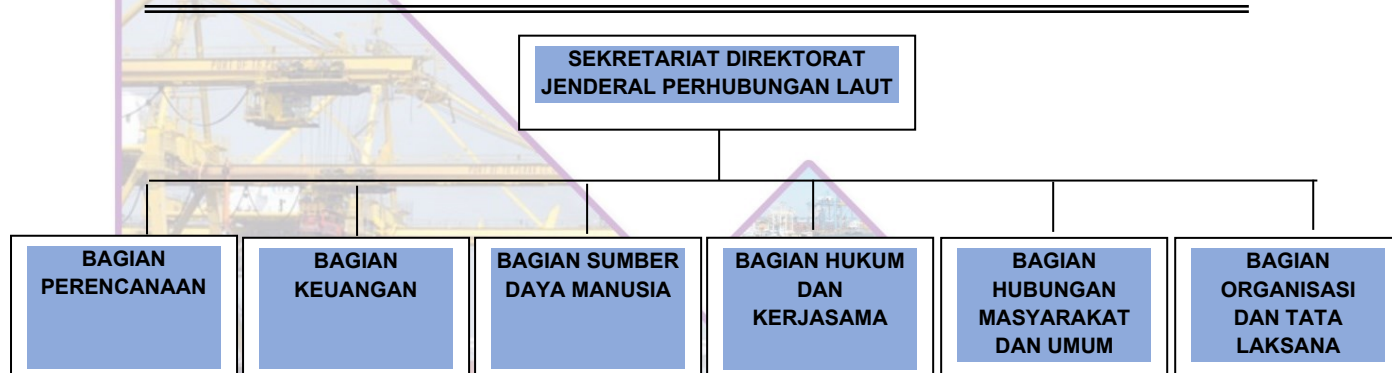
- 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019;
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 26. Surat Keputusan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
 27. Surat Keputusan Direktorat Jenderal tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024;



B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Setditjen Hubla adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 17 Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Jenderal Perhubungan Laut.

2. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional *ekstern* dan *intern* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;



- c. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum ; dan
- f. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a) Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b) Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional *intern*, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan



- c) Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan,
- d) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional *ektern*, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.

c. Bagian Sumber Daya Manusia

1) Tugas Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

d. Bagian Hukum dan Kerja Sama

1) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan



dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama

- a) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- b) Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum

1) Tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik



Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

f. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1) Tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2025 yaitu 390 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.1. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2024	2025
1.	S3	2	1
2.	S2	56	69
3.	S1	142	160
4.	D4	5	10
5.	D3	44	47
6.	D2		
7.	D1	8	9
8.	SLTA atau Kurang	63	82
8.	BLANK	3	6
9	Pensiun	9	6
TOTAL		332	390



b. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.2. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2024	2025
1.	IV/e		
2.	IV/d	1	
3.	IV/c	2	3
4.	IV/b	1	5
5.	IV/a	20	27
6.	III/d	78	74
7.	III/c	67	64
8.	III/b	53	54
9.	III/a	52	50
10.	II/d	20	19
11.	II/c	9	7
12.	II/b	11	10
13.	II/a		1
14.	I/d	1	1
15.	I/c		
16.	I/b		
17.	I/a		
18.	X		
19.	IX	5	29
20.	VII	3	7
21.	V		25
22.	PPPK PW		8
23.	PENSIUN	9	6
TOTAL		332	390



BAB II

PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029, merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memerintahkan agar di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Strategis Tahun 2020-2024 setiap Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi di bawahnya wajib menyiapkan konsep Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 juga tidak terlepas dari arahan kebijakan penyelenggaraan transportasi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta amanat dari Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (dan perubahannya). Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan sebagai pelaksanaan visi dan misi Presiden di bidang transportasi laut khususnya dalam penyelenggaraan kesekretariatan untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sedangkan dalam konteks pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman untuk melaksanakan rencana kerja pelaksanaan pembangunan bidang kesekretariatan untuk periode Tahun 2025-2029, selain itu akan menjadi dasar dari berbagai dokumen SAKIP lainnya di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut antara lain; Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (Renaksi atas PK), dan Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKIP), serta dokumen pemantauan dan evaluasi lainnya.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025- 2029 disusun untuk menindaklanjuti beberapa isu strategis pada bidang kesekretariatan di periode Tahun 2020-2024 yang menyebabkan perubahan secara signifikan pada indikator kinerja, sistem perencanaan dan penganggaran, serta organisasi, khususnya dengan adanya perubahan struktur penganggaran melalui 2 Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan perubahan organisasi sesuai PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sehingga diperlukan penyesuaian arah kebijakan serta program kegiatan pada dokumen Rencana Strategis di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029

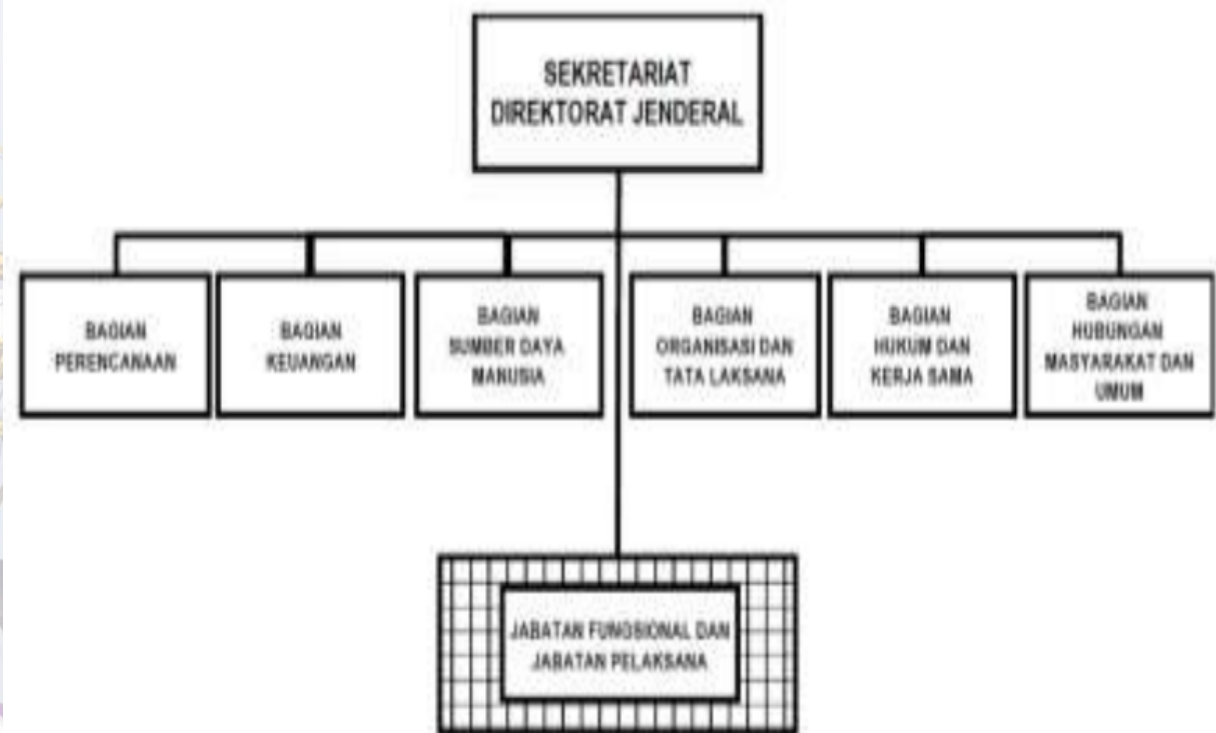
B. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Sesuai Pasal 219 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan 7 fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
3. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
4. Penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
7. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal



Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menjalankan tugas dan fungsi terdiri dari 6 bagian (Gambar 1.1), yang terdiri dari: Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum dan Kerja Sama, serta Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

(Sumber: Permenhub Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)

C. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT PERIODE TAHUN 2020-2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 dilakukan pada setiap tahunnya yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis, Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Evaluasi Realisasi Anggaran.

1. Evaluasi Realisasi Anggaran, membandingkan antara perencanaan anggaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 dengan realisasi alokasi anggaran (khususnya APBN) dalam DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020- 2024.



2. Evaluasi Pencapaian Sasaran, yang membandingkan antara target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 dengan realisasi capaian sasaran dalam LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 sd Tahun 2024

D. EVALUASI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 2020-2024

Disampaikan capaian Sasaran Kegiatan (SK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selama Tahun 2020-2024 yang direpresentasikan melalui perbandingan antara rencana capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditargetkan dalam PK dengan realisasi capaian IKK tersebut sebagaimana dilaporkan dalam LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sepanjang Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024





LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Tabel II.1.1. Data Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Indikator Kinerja		Satuan	2020				2021				2022				2023				2024			
			Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut																					
IKK1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	0	0	-	9	0	0	-	9	0	0	-	9	4,38	4,38	100	10	7,14	7,14	100
IKK2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	sertifikat	1.900	1.408	1.408	100	1.900	889	889	100	300	300	300	100	300	386	386	100	400	380	380	100
IKK3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	97	97	100	84	82	82	100	86	83	83	100	88	85	85	100	90	90	90	100
IKK4	Kepuasan publik ataslayanan informasi/kehumasan	Skala likert	4	4	4	100	4	4	4	100	4	4	4	100	4	4	4	100	4	4	4	100
IKK5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12	11	11	100	16	27	27	100	21	27	27	100	26	26	26	100	30	30	30	100
IKK6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	81,41	81,41	100	86	75,92	75,92	100	88	80,42	80,42	100	89	80,79	80,79	100	82	80,81	80,81	100
IKK7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	2,95	2,95	100	3	2,96	2,96	100	3	3,758	3,758	100	3	3,486	3,486	100	3	3,83	3,83	100



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	2020				2021				2022				2023				2024			
			Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%
IKK8	Persentase Daya Serap Ditjen Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,03	95,98	95,98	100	93,15	96,29	96,29	100	93,23	96,97	96,97	100	93,36	97,81	97,81	100	97,7	97,63	97,63	100
IKK9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	10	10	10	100	12	23	23	100	14	14	14	100	17	14	14	100	20	20	20	100
IKK10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10	10	10	100	10	17	17	100	10	10	10	100	10	8	8	100	15	15	15	100
IKK11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	3	2	2	100	6	3	3	100	9	3	3	100	11	9	9	100	-	-	-	-

Keterangan:

Renstra = Rencana capaian/target IKK tahunan sebagaimana tercantum di dalam Renstra Direktorat Tahun 2020-2024

PK = Rencana capaian/target IKK tahunan sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat sepanjang Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

LKIP = Realisasi capaian/target IKK tahunan sebagaimana dilaporkan di dalam LKIP Direktorat sepanjang Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

% = Perbandingan antara rencana dalam PK vs realisasi dalam LKIP capaian/target IKK tahunan

*) Penjelasan tentang kendala atau posisi terakhir kemajuan pelaksanaan kegiatan



Dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 terdapat 10 IKK (satu IKK tidak digunakan pada periode akhir renstra sehingga IKK berkurang dari 11 menjadi 10 IKK). Tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa dari sebanyak 10 IKK dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 seluruh IKK berhasil mencapai kinerja 100% hingga akhir Tahun 2024. Adapun capaian Sasaran Kegiatan (SK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selama Tahun 2020-2024 jika direpresentasikan melalui perbandingan antara rencana capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditargetkan dalam Renstra 2020-2024 dengan realisasi capaian IKK tersebut sebagaimana dilaporkan dalam LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sepanjang Tahun 2020-2024, sebanyak 6 IKK (60%) yang berhasil mencapai kinerja 100% atau lebih hingga akhir Tahun 2024 sementara 4 IKK (40%) tidak dapat mencapai kinerja 100%. Evaluasi keberhasilan dan ketidaktercapaian pada setiap IKK di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024, sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya kinerja IKK1 Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan dikarenakan indikator tergantung pada keputusan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bukan karena rendahnya kinerja dari Ditjen Perhubungan Laut sendiri. Realisasi alokasi formasi SDM masih belum optimal karena arah kebijakan kelulusan berada di Kemenpan RB sehingga jumlah lulusan yang disetujui tidak sesuai kebutuhan awal yang diusulkan. Meskipun Ditjen Perhubungan Laut telah mengusulkan kebutuhan SDM sesuai hitungan kebutuhan organisasi, akan tetapi usulan formasi belum diberikan persetujuan sepenuhnya oleh Kemenpan RB, sehingga realisasinya lebih rendah dari target yang ditetapkan.
2. Realisasi kinerja IKK2 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh aktivitas peningkatan kompetensi SDM masih terpengaruh oleh proses pemulihan (recovery) dari kondisi pandemi COVID-19. Hal ini berdampak pada kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dibiayai dari anggaran Ditjen Perhubungan Laut, yang menjadi salah satu kontributor utama bagi tercapainya target kompetensi. Walaupun capaian sudah mendekati target, proses pemulihan masih menyebabkan keteringgalan dari angka 100 %.

3. Capaian kinerja IKK6 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan III, dan hasilnya adalah 80,82 dari target 82. Nilai inilah yang digunakan untuk menghitung persentase capaian AKIP, sehingga capaian menjadi 98,56 %. Ini berarti Ditjen Perhubungan Laut sudah sangat mendekati target nilai AKIP, tapi belum sepenuhnya maksimal sesuai target angka 82. Evaluasi AKIP mencakup lima komponen utama seperti: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja. Pada keseluruhan komponen, akumulasi skor tidak mencapai nilai penuh (82), meskipun skor total 80,82 sudah tergolong A (Sangat Baik). Kekurangan skor inilah yang membuat persentase capaian tidak bisa menjadi 100 %.
4. Capaian kinerja IKK8 Persentase Daya Serap Anggaran Ditjen Perhubungan Laut hanya mencapai 99,93 %, hal ini disebabkan realisasi anggaran yang tercatat di akhir periode Desember tidak sepenuhnya mencapai target pagu anggaran yang ditetapkan di mana terdapat sedikit selisih masih tersisa dari anggaran yang belum terserap sepenuhnya sampai akhir Desember.

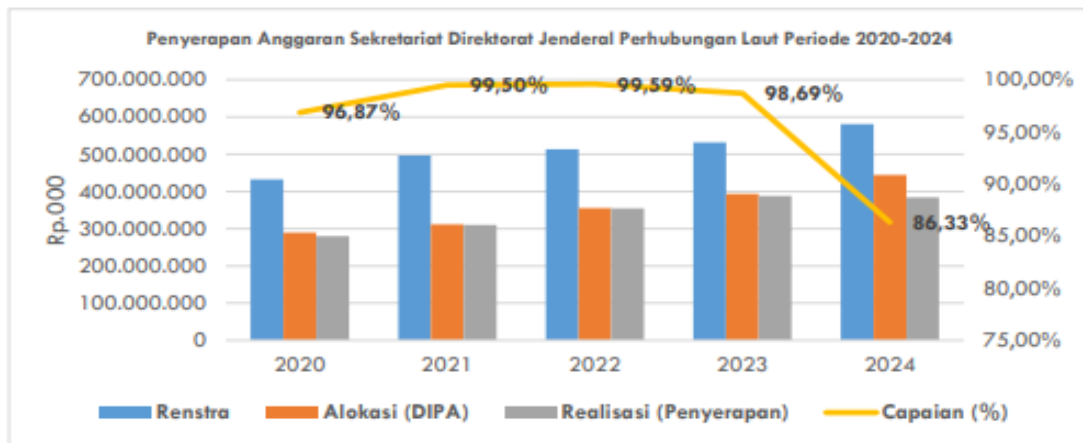
E. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 2020-2024

Disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran yang membandingkan antara rencana kebutuhan anggaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 dengan alokasi pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 serta dengan penyerapan anggaran pada setiap tahun antara Tahun 2020-2024

Tabel : II.1.2 Data Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Tahun	Anggaran Direktorat (Rp.000)			
	Renstra	DIPA	Penyerapan	Capaian (%)
2020	432.072.867	289.120.526	280.061.867	96.87%
2021	496.753.416	311.432.711	309.865.163	99.50%
2022	513.760.284	355.687.369	354.221.973	99.59%
2023	531.461.061	393.355.416	388.215.482	98.69%
2024	581.098.516	444.420.843	383.652.428	86.33%
Total	2,555,146,144	1,794,016,865	1,716,016,913	95.65%

Sumber: Diolah dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, serta LAKIP Tahun 2020, 2021, 2022, 2024



Gambar 1.2 Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Periode 2020-2024

Memperhatikan data yang disajikan pada Tabel 1.2, Terlihat bahwa dari total kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 sebesar Rp 2,555,146,144 hanya sebanyak Rp 1,794,016,865 yang dialokasikan dalam DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 (alokasi anggaran hanya 70,21% rencana kebutuhan). Dari alokasi DIPA tersebut, secara total hingga akhir Tahun 2024 hanya dapat terserap sebanyak Rp 1,716,016,913 (realisasi penyerapan hanya 95,65% dari alokasi DIPA).

Penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020–2024 belum mencapai 100% antara lain dipengaruhi oleh kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, penerapan efisiensi belanja, penyesuaian prioritas kegiatan, serta perubahan pola kerja dan pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja, karena sebagian besar indikator kinerja utama tetap tercapai sesuai target, sehingga pengelolaan anggaran tetap menunjukkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas



F. EVALUASI KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 2020-2024

Tabel : II.1.3 Data Evaluasi Kerangka Regulasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Periode Tahun 2020-2024

No	Rencana Strategis	Perkembangan			Penjelasan
		Sudah Dilaksanakan	Kewenangan Unit Terkait	Dalam Proses	
1.	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law di bidang transportasi laut.	V			Sudah diterbitkan PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
2.	Deregulasi perizinan di masing- masing Direktorat dalam rangka meningkatkan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran (EoDB).	V			Sudah diterbitkan: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
3.	Regulasi pendukung penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan di pelabuhan	V			Sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
4.	Reviu atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional	V			Sudah dilakukan studi Reviu RIPN Tahun 2020, saat ini sedang proses penetapan reviu KP 432/2017 tentang RIPN
5.	Perlu adanya sebuah Peraturan Presiden/Perpres untuk Implementasi Integrated Port Network (IPN) yang di dalamnya berdasar pada tiga pilar strategis. "yaitu standarisasi infrastruktur, suprastruktur dan pola operasional di 7 pelabuhan utama, integrasi kawasan industri dengan pelabuhan, dan membentuk aliansi pelayaran untuk efisiensi operasional jaringan pelayaran melalui peningkatan ukuran kapal dan aktivasi rute pendulum (<i>looping service</i>)"		V		Pengimplementasi <i>Integrated Port Network</i> (IPN) di koordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
6.	Penyusunan Roadmap pengalihan Pelabuhan Pengumpan kepada Pemerintah Daerah, menyusun dan menyempurnakan NSPK baik proses pengalihan			V	Sudah dilakukan <i>pilot project</i> untuk penyerahan pelabuhan pengumpan kepada Daerah di beberapa Provinsi



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

No	Rencana Strategis	Perkembangan			Penjelasan
		Sudah Dilaksanakan	Kewenangan Unit Terkait	Dalam Proses	
	maupun pembinaan bidang laut kepada Pemerintah Daerah				
7.	Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP dan KSO Pelabuhan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	V			Telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
8.	Revisi peraturan dalam rangka memenuhi ketentuan internasional di bidang pelayaran. Hal ini untuk mendukung berbagai konvensi internasional yang dikeluarkan oleh IMO (<i>International Maritime Organization</i>) terutama SOLAS (<i>International Convention for the Safety of Life at Sea</i>), MARPOL (<i>International Convention for the Prevention of Pollution from Ships</i>), dan STCW (<i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers</i>)	V			Telah diterbitkan: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya - Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 58 tahun 2021 tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention 2006 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
9.	Ratifikasi sejumlah konvensi IMO terkait dengan kepelabuhanan, kepelautan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim	V			
10.	Peraturan Presiden Tentang Integrasi Pengelolaan Pelabuhan Hub Tol Laut, sebagai dukungan pelaksanaan Tol Laut	V			Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan
11.	Penyusunan <i>Blue Print/ Masterplan</i> penyelenggaraan tol laut/perintisan.		V		Integrasi program tol laut secara multi sektoral dikoordinir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

No	Rencana Strategis	Perkembangan			Penjelasan
		Sudah Dilaksanakan	Kewenangan Unit Terkait	Dalam Proses	
	Pemerintah perlu segera merancang dan menetapkan rencana induk (<i>master plan</i>) Tol Laut/Perintis. Rencana induk diperlukan sebagai acuan Kementerian atau Lembaga terkait dalam mengimplementasikan Tol Laut. acuan ini juga diperlukan bagi para pelaku dan para pihak (<i>stakeholders</i>) lainnya untuk terlibat dalam Program Tol Laut, termasuk perusahaan-perusahaan pelayaran. Rencana induk itu mencakup perencanaan rute, pelaku, mekanisme, rencana pengembangan pelabuhan dan infrastruktur lainnya, serta industri pendukung, termasuk galangan kapal				Integrasi jaringan keperintisan antar moda dikoordinir pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan
12.	Penyesuaian dasar hukum pelaksanaan pelayaran perintis, <i>Public Service Obligation</i> angkutan barang, dan kapal ternak. Pembuatan dasar hukum khusus pelaksanaan pelayaran perintis, <i>Public Service Obligation</i> angkutan barang, dan kapal ternak, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan	V			Sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi
13.	Pembuatan dasar hukum penataan jaringan trayek pelayaran nasional. Hal ini sebagai upaya restrukturisasi jaringan trayek pelayaran nasional.			V	Sudah dilakukan kajian pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terkait Rencana Induk Jaringan Angkutan Laut Nasional pada Tahun 2022 Saat ini sedang dalam proses penyempurnaan menuju tahap penetapan.
14.	Rencana umum pengembangan bidang kenavigasian (masterplan kenavigasian, penataan ruang wilayah perairan). Sebagai tinjau ulang terhadap <i>masterplan</i> Rencana Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas Maritim (MTSDP) tahun 2002, dengan menyusun			V	Sudah dilakukan kajian pada Direktorat Kenavigasian terkait Rencana Induk Kenavigasian Laut pada Tahun 2021 Saat ini sedang dalam proses penyempurnaan menuju tahap penetapan.



No	Rencana Strategis	Perkembangan			Penjelasan
		Sudah Dilaksanakan	Kewenangan Unit Terkait	Dalam Proses	
	Masterplan Kenavigasian yang efektif dan efisien, yang mencakup aspek SBNP, Telekomunikasi pelayaran, penetapan alur pelayaran, serta penyediaan sarana kapal negara kenavigasian				
15.	Penetapan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai		V		Penguatan Kelembagaan Penjagaan laut dan Pantai dikoordinir oleh Bakamla
16.	Penguatan pelaksanaan regulasi NCVS. Sebagai implementasi aturan standar kapal nonkonvensi yang tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal nonkonvensi berbendera Indonesia			V	Sudah dilakukan kajian dan pembahasan mengenai perubahan KM 65 Tahun 2009 dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12
17.	Dukungan kebijakan pendanaan terhadap kredit perbankan untuk pengadaan kapal baru Sebagai bentuk fasilitasi permodalan bagi perusahaan pelayaran nasional. Pasca berlakunya kebijakan scrapping yang mengharuskan semua kapal yang umumnya lebih dari 25 tahun harus dilebur, pemerintah perlu membantu pengadaan kapal baru dalam hal ini			V	Sedang dilakukan kajian pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terkait Skema Pendanaan Kapal pada Tahun 2023
18.	Regulasi pendukung UMKM (termasuk TKBM) dalam memperkuat peran dan pengusahaannya Dilakukan melalui revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal	V			Sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
19.	Kewajiban penggunaan AIS terhadap seluruh kapal.	V			Sudah diterbitkan:



No	Rencana Strategis	Perkembangan			Penjelasan
		Sudah Dilaksanakan	Kewenangan Unit Terkait	Dalam Proses	
	Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia				- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 7 Tahun 2019 Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 Tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal Berbendera Indonesia Tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal Berbendera Indonesia - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK. 205/8/5/DJPL/2019 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Pengujian Peralatan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) Klas B Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Pengujian Peralatan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) Klas B
20.	Penerapan SOLAS secara bertahap hingga mencapai standar maksimal.	V			Telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

No	Rencana Strategis	Perkembangan			Penjelasan
		Sudah Dilaksanakan	Kewenangan Unit Terkait	Dalam Proses	
	Sebagai implementasi SOLAS yang menjadi standar keselamatan maritim yang wajib diterapkan pada kapal niaga (<i>merchant vessel</i>) berukuran > 500 DWT dan menjadi induk bagi terbitnya berbagai standar (<i>code</i>) bagi konstruksi kapal, peralatan, dan pengoperasian				Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya
21.	Pelaksanaan <i>beyond cabotage</i> . Sebagai penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor CPO dan batu bara, serta impor beras dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia	V			Sudah diterbitkan Permendag No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendag No 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu
22.	Standar pelayanan penumpang difabel serta ibu hamil dan menyusui pada angkutan laut penumpang. Merupakan implementasi dan penyusunan SPM dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus			V	Penyediaan fasilitas penyanggah difable sudah diakomodir di dalam PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Sedang dilakukan proses kajian untuk revisi di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

No	Rencana Strategis	Perkembangan			Penjelasan
		Sudah Dilaksanakan	Kewenangan Unit Terkait	Dalam Proses	
23.	Pemberdayaan Pelayaran Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan diamanatkan bahwa pembinaan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut Pelayaran Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. keberadaan Pelayaran Rakyat akan membantu sistem transportasi nasional, terutama untuk daerah pedalaman, terpencil, dan terisolir	V			Telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Keterangan:

Sudah = Kebutuhan Kerangka Regulasi telah diakomodir dalam Peraturan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Unit Terkait = Kebutuhan Kerangka Regulasi telah diakomodir dalam Peraturan yang diterbitkan Unit atau Instansi Terkait Lainnya

Belum = Kebutuhan Kerangka Regulasi belum selesai dilaksanakan (on-Progress)



G. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Perkembangan Lingkungan Strategis Bidang Kesekretariatan Perhubungan Laut

Berbagai dinamika yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan membawa implikasi baik positif maupun negatif baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan di bidang transportasi laut, khususnya bidang kesekretariatan sebagai salah satu komponennya. Perkembangan lingkungan strategis tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesekretariatan yang menjadi tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai penanggung jawab pelaksanaannya.

Disampaikan telaahan mengenai perkembangan lingkungan strategis global maupun nasional yang mempengaruhi arah penyelenggaraan bidang kesekretariatan Setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Perkembangan lingkungan strategis tersebut dapat menjadi peluang (opportunities) ataupun ancaman (threats) bagi bidang kesekretariatan yang perlu diantisipasi dengan berbagai inisiatif strategis baik berupa kebijakan, program, kegiatan yang tepat sasaran maupun tepat besara

Tabel II.1.4 Data Perkembangan Lingkungan Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
1.	Sosial/ Demografi	- Bonus Demografi - Pertumbuhan penduduk, urbanisasi wilayah pesisir, peningkatan mobilitas masyarakat antarwilayah dan antarpulau, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan kualitas pelayanan publik. - Perkembangan kelas menengah	Menuntut penguatan layanan kesekretariatan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan; peningkatan kapasitas SDM, pelayanan administrasi, serta pengelolaan informasi publik.
2.	Teknologi	- Penetrasi Internet - Ekonomi Digital - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi proses pemerintahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta pemanfaatan data dan aplikasi terpadu.	Memerlukan modernisasi sistem administrasi kesekretariatan, penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kompetensi digital ASN, serta penyesuaian tata kelola perencanaan, keuangan yang berbasis digital.
3.	Ekonomi	- Disparitas Ekonomi - Konektivitas Nasional/Biaya Logistik - Transformasi Struktural Ekonomi Nasional	Mendorong kesekretariatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, efisiensi pengelolaan keuangan dan BMN, serta penguatan fungsi

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
			pengendalian dan akuntabilitas keuangan.
4.	Lingkungan	Kebijakan Nasional bidang energi, lingkungan, kebencanaan	Mengharuskan kesekretariatan mendukung kebijakan nasional seperti ramah lingkungan melalui pengelolaan perkantoran berkelanjutan serta dukungan administrasi terhadap kebijakan transportasi laut berwawasan lingkungan.
5.	Politik	- Dukungan terhadap kawasan prioritas (KEK, KI, KSPN/DPN, SKPT, KSPP) - Indonesia Poros Maritim Dunia - Ibu Kota Negara (IKN) Baru	Menuntut kesekretariatan berperan aktif dalam menjaga kesinambungan kebijakan, meningkatkan koordinasi internal dan lintas unit, serta memastikan dukungan administrasi yang adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah.
6.	Regulasi/Hukum	- Penyederhanaan regulasi dan birokrasi - Berkurangnya instrumen pengaturan dan prosedur formal yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administrasi	Menuntut perubahan signifikan pada peran Sekretariat Ditjen dari pengelola administrasi menjadi pengendali kinerja dan penjamin akuntabilitas, yang memerlukan penyesuaian indikator kinerja berbasis hasil, peningkatan kompetensi SDM yang adaptif terhadap digitalisasi dan SPBE, serta penguatan pengendalian internal berbasis risiko. Tanpa penguatan tersebut, penyederhanaan regulasi dan birokrasi berpotensi menurunkan kualitas koordinasi, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
7.	Etika Sektor/ Pemerintahan	- Pengarusutamaan (3TP/DTPK, ekonomi lemah, UMKM, isu gender, dll) <i>Good and Clean Governance</i>	Mendorong penguatan budaya kerja berintegritas, penerapan kode etik ASN, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan yang akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.

Disampaikan berbagai kondisi di bidang kesekretariatan yang menjadi permasalahan atau isu strategis yang harus diselesaikan untuk perioda Renstra 2025-2029 ke depan. Isu strategis tersebut mencakup semua aspek terkait penyelenggaraan bidang kesekretariatan mulai dari regulasi dan kelembagaan, penyediaan sumber daya (SDM, pendanaan, peralatan, informasi), kecukupan penyediaan sarana dan prasarana bidang kesekretariatan hingga ke kinerja dan dampak/manfaat yang diharapkan oleh masyarakat.

Tabel II.1.5 Data Perkembangan Isu Strategis Bidang Kesekretariatan

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
	Pendukung Bidang		
1.	Pendanaan	Keterbatasan pendanaan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayaran, serta dalam penyediaan jaringan angkutan laut dan pelabuhan yang merata dan berkinerja tinggi. Adapun optimalisasi skema pendanaan alternatif (KSO/KSP, KPBU, PINA) masih relatif terbatas	- Berdampak langsung pada ruang fiskal dalam mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, serta pengendalian program. - Ketergantungan yang tinggi pada APBN berpotensi membatasi kemampuan Sekretariat Ditjen dalam menjamin keberlanjutan pendanaan program prioritas, mengendalikan risiko ketidaktercapaian target kinerja, serta menjaga konsistensi implementasi kebijakan. - Terbatasnya pemanfaatan skema pendanaan alternatif seperti KSO/KSP, KPBU, dan PINA menambah kompleksitas peran Sekretariat Ditjen dalam memastikan kesiapan regulasi, kelembagaan, dan tata kelola kerja sama, termasuk penguatan fungsi koordinasi, penjaminan akuntabilitas, dan
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah dan kompetensi SDM sektor transportasi laut yang belum memadai sesuai kebutuhan operasional maupun pemenuhan terhadap standar internasional	- Meningkatkan beban kerja aparatur, melemahkan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja, serta berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan transportasi laut - Jenjang karir dan kebutuhan pengembangan SDM eksisting - Diperlukan penyusunan Masterplan Pengembangan SDM Transportasi Laut sebagai pedoman strategis dalam perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan SDM secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Masterplan ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penentuan kebutuhan jumlah dan jenis SDM, pengembangan kompetensi berbasis standar nasional dan internasional, serta sinkronisasi kebijakan pengembangan SDM dengan prioritas pembangunan transportasi laut. Dengan demikian, ketersediaan SDM yang profesional dan berdaya saing dapat mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan transportasi laut secara efektif dan berkelanjutan
3.	Fasilitas Kerja	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja serta fasilitas	Menurunnya efektivitas dan kenyamanan kerja aparatur

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
		pendukung pelaksanaan kinerja dari jajaran aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di lapangan	Menurunkan efektivitas dukungan administratif, pengendalian kinerja, dan kualitas pelaksanaan kebijakan serta layanan transportasi laut
4.	Sistem Informasi	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi memasuki era Industri 4.0 di bidang pelayaran di Indonesia masih sangat terbatas yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan;	- Rendahnya efisiensi proses administrasi, lemahnya integrasi data, serta keterbatasan dukungan pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja berbasis digital. - keterbatasan pemanfaatan TIK menuntut peran Setditjen Hubla dalam memperkuat perencanaan dan tata kelola SPBE, peningkatan kompetensi digital aparatur, serta integrasi sistem informasi lintas unit kerja agar efektivitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja sektor pelayaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
5.	Regulasi	- Perlu dilakukan pembaruan terhadap sejumlah regulasi di bidang pelayaran untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pelaksanaan dalam rangka mendorong transformasi struktural dalam penyelenggaraan transportasi nasional; - Perlunya dilakukan koordinasi lintas sektoral dalam menangani dampak regulasi sektor terkait terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya terkait dengan penataan ruang, lingkungan, dan investasi	- Regulasi yang belum diperbarui berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi, serta arah transformasi struktural transportasi nasional, sehingga menyulitkan implementasi kebijakan dan pengukuran kinerja. Kondisi ini menuntut peran Setditjen Hubla untuk memperkuat perencanaan regulasi yang terintegrasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penjaminan kualitas substansi regulasi agar tetap relevan, efektif, dan mendukung percepatan transformasi penyelenggaraan transportasi laut secara akuntabel dan berkelanjutan - Belum optimalnya harmonisasi regulasi penataan ruang, lingkungan, dan investasi menurunkan kepastian kebijakan, meningkatkan risiko keterlambatan, dan inefisiensi pelaksanaan program hal ini menuntut peran Setditjen Hubla dalam memperkuat fungsi koordinasi, harmonisasi regulasi, dan fasilitasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan, dampak regulasi sektoral berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis, menurunkan kinerja organisasi, dan mengurangi efektivitas pembangunan sektor transportasi laut

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
6.	Kelembagaan	• Perlunya dilakukan optimalisasi dan restrukturisasi dari banyaknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; • Sistem birokrasi dalam penyelenggaraan bidang transportasi laut yang masih belum efisien dalam mendukung peningkatan kinerja dan perkembangan industri transportasi laut	• Banyaknya UPT meningkatkan kompleksitas koordinasi, beban pengendalian, dan potensi duplikasi fungsi, sehingga menuntut penataan kelembagaan agar lebih ramping dan efektif hal ini menuntut peran Setditjen Hubla untuk memperkuat fungsi perencanaan organisasi, penataan kelembagaan, serta sistem pengawasan dan evaluasi agar struktur UPT lebih ramping, efektif, dan selaras dengan sasaran strategis pembangunan transportasi laut nasional. • Belum efisiennya sistem birokrasi transportasi laut menghambat kecepatan layanan, efektivitas dukungan administrasi, dan pengendalian kinerja, serta mengurangi daya dukung kebijakan bagi perkembangan industri pelayaran hal ini menuntut peran Setditjen Hubla untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih adaptif, penyederhanaan proses bisnis, dan penguatan tata kelola berbasis kinerja guna meningkatkan efisiensi organisasi dan daya saing sektor pelayaran secara berkelanjutan.

H. SASARAN

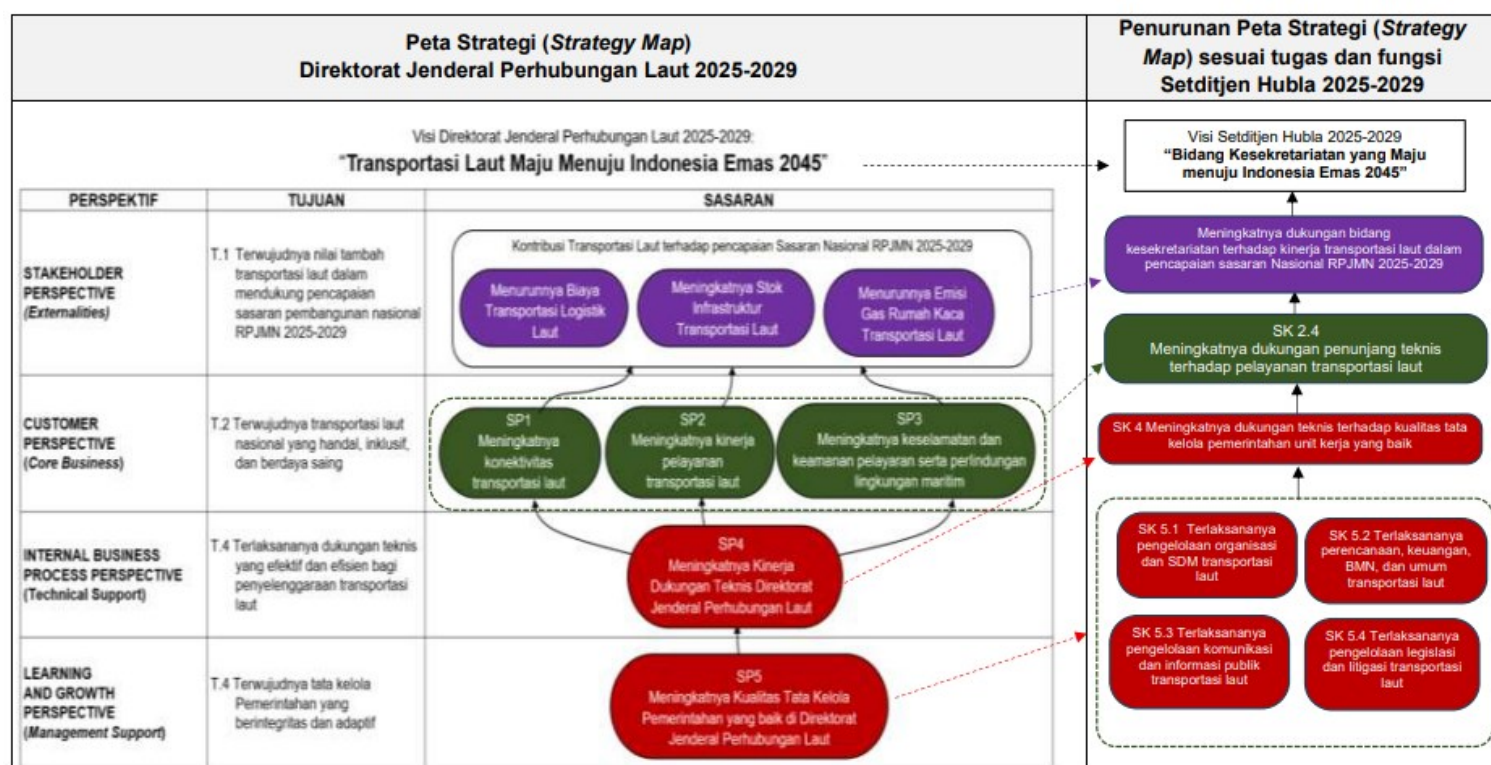
1. Perumusan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029

Sesuai pasal 1 Butir 17 PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertian Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut dalam Perpres No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis sasaran sesuai dengan tingkatan unit kerja pengampunya yakni :

- a. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis (SS) merupakan sasaran untuk level Kementerian/Lembaga. 2)

- b. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga. Sasaran Program (SP) merupakan sasaran untuk level Unit Kerja Eselon I di suatu Kementerian/Lembaga. 3)
- c. Sasaran Kegiatan (SK) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program (SP) yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan (SK) merupakan sasaran untuk level Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di suatu Unit Kerja Eselon I pada Kementerian/Lembaga

Sebagaimana diterapkan dalam proses penetapan Sasaran Strategis (SS) pada level Kementerian Perhubungan dan penetapan Sasaran Program (SP) pada level Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penetapan Sasaran Kegiatan (SK) pada Level Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga dilakukan dengan proses cascading (penurunan) dengan ruang lingkup yang dipersempit sesuai tugas dan fungsi, dimana susunan strateginya mengikuti peta strategi (strategy map) pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC)



Gambar 1.1 Penurunan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun 2025-2029

2. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029

Sesuai dengan Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi sasaran dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. sebelumnya maka daftar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi indikator kinerja dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 disampaikan pada :

Tabel II.1.6 : Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		Satuan
Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	
IKP 2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi laut	Indeks
SK 2.4	Meningkatnya dukungan penunjang teknis terhadap pelayanan transportasi laut	
IKK 2.4.1	Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%
IKK 2.4.2	Tingkat keandalan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%
IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks
SP 4	Meningkatnya kinerja dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
IKP 4	Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%

SK 4	Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan unit kerja yang baik	
IKK 4.1	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%
IKK 4.2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%
IKK 4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%
IKK 4.4	Persentase penyelenggaraan kegiatan pendukung	%
IKK 4.5	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	%
IKK 4.6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	indeks
IKK 4.7	Persentase penyelenggaraan layanan internal	%
IKK 4.8	Persentase penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%
IKK 4.9	Persentase penyelenggaraan badan layanan umum (BLU)	%
IKK 4.10	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	%
SP 5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
IKP 5	Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%
SK 5.1	Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut	
IKK 5.1.1	Persentase terselenggaranya layanan manajemen SDM	%
IKK 5.1.2	Persentase terselenggaranya layanan organisasi dan tata kelola internal	%
IKK 5.1.3	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%
IKK 5.1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%
IKK 5.1.5	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	indeks
SK 5.2	Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut	
IKK 5.2.1	Persentase terselenggaranya layanan perencanaan	%
IKK 5.2.2	Persentase terselenggaranya layanan anggaran	%
IKK 5.2.3	Persentase terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi	%
IKK 5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	nilai
IKK 5.2.5	Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	%
IKK 5.2.6	Persentase terselenggaranya layanan umum	%
IKK 5.2.7	Persentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti	%
IKK 5.2.8	Persentase pencapaian kerjasama pemanfaatan (KSP) yang dilaksanakan	%
IKK 5.2.9	Persentase usulan penetapan status penggunaan barang milik negara (PSP BMN) yang ditindaklanjuti	%

SK 5.3	Terlaksananya pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi laut	
IKK 5.3.1	Persentase terselenggaranya layanan kehumasan	%
IKK 5.3.2	Persentase terselenggaranya layanan data dan informasi	%
IKK 5.3.3	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	nilai
IKK 5.3.4	Persentase publikasi informasi melalui media sosial	%
IKK 5.3.5	Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	indeks
SK 5.4	Terlaksananya pengelolaan legislasi dan litigasi transportasi laut	
IKK 5.4.1	Persentase terselenggaranya layanan hukum	%
IKK 5.4.2	Persentase terselenggaranya layanan kerjasama dan kemitraan	%
IKK 5.4.3	Persentase perjanjian kerja sama bidang transportasi laut yang disepakati	%
IKK 5.4.4	Persentase penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi bidang transportasi laut	%
IKK 5.4.5	Persentase keterlibatan kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam kerjasama internasional	%

I. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029.

Dengan memperhatikan capaian kinerja pada periode pembangunan sebelumnya (Renstra 2020-2024), perkiraan alokasi anggaran dalam Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM), serta kebutuhan dukungan bidang kesekretariatan terhadap penyelenggaraan transportasi laut sebagai pendorong pembangunan nasional di segala bidang, maka ditetapkan target capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 seperti yang disampaikan pada Tabel :

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.4	IKK 2.4.1	Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 2.4.2	Tingkat keandalan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	90	92,5	95,0	97,5	100	100
	IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	96,4	96,52	96,6	96,85	97,3
SK 4	IKK 4.1	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 4.2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 4.4	Persentase penyelenggaraan kegiatan pendukung	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 4.5	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 4.6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	indeks	97,63 (%)	94	94,2	94,7	95,0	95,3
	IKK 4.7	Persentase penyelenggaraan layanan internal	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 4.8	Persentase penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%	-	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
	IKK 4.9	Persentase penyelenggaraan badan layanan umum (BLU)	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 4.10	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	%	380 (sertifikat)	100	100	100	100	100
SK 5.1	IKK 5.1.1	Persentase terselenggaranya layanan manajemen SDM	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.1.2	Persentase terselenggaranya layanan organisasi dan tata kelola internal	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.1.3	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.1.5	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	indeks	-	79,5	79,75	80,00	80,25	80,50
	IKK 5.2.1	Persentase terselenggaranya layanan perencanaan	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.2.2	Persentase terselenggaranya layanan anggaran	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.2.3	Persentase terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	nilai	80,81	80	80,15	80,25	80,35	80,45

LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.2	IKK 5.2.5	Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.2.6	Persentase terselenggaranya layanan umum	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.2.7	Persentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.2.8	Persentase pencapaian kerjasama pemanfaatan (KSP) yang dilaksanakan	%	30 (Kerjasama)	100	100	100	100	100
	IKK 5.2.9	Persentase usulan penetapan status penggunaan barang milik negara (PSP BMN) yang ditindaklanjuti	%	15 (Status BMN)	100	100	100	100	100
	IKK 5.3.1	Persentase terselenggaranya layanan kehumasan	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.3.2	Persentase terselenggaranya layanan data dan informasi	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.3.3	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	nilai	4 (Skala Likert)	3,8	3,9	4	4,1	4,2
SK 5.3	IKK 5.3.4	Persentase publikasi informasi melalui media sosial	%	-	90,00	90,15	90,30	90,50	90,75
	IKK 5.3.5	Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	indeks	-	3,8	3,9	4	4,1	4,2
SK 5.4	IKK 5.4.1	Persentase terselenggaranya layanan hukum	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.4.2	Persentase terselenggaranya layanan kerjasama dan kemitraan	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.4.3	Persentase perjanjian kerja sama bidang transportasi laut yang disepakati	%	-	100	100	100	100	100
	IKK 5.4.4	Persentase penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi bidang transportasi laut	%	20 (konsep peraturan)	100	100	100	100	100
	IKK 5.4.5	Persentase keterlibatan kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam kerjasama internasional	%	-	100	100	100	100	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.



4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada tinjauan ucxlang RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Terhadap target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan



di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja.





B. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel III.2.1 Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SK 2.4	Meningkatnya Dukungan Penunjang Teknis Terhadap Pelayanan Transportasi Laut	IKK 2.4.1	Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 2.4.2	Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	96,40	0	94,56	93,82	93,82	93,82	97,32
SK 4	Meningkatnya Dukungan Teknis Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Yang Baik	IKK 4.1	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 4.2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan Nspk	%	100	100	100	100	100	100	100



		IKK 4.4	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 4.5	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 4.6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indeks	94	99,57	96,27	94,99	94,45	94,45	100,48
		IKK 4.7	Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 4.8	Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 4.10	Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL	%	100	100	100	100	100	100	100
SK 5.1	Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut	IKK 5.1.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM	%	100	100	100	100	100	100	100



		IKK 5.1.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.1.3	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.1.4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	0	68,6	0	51,5	120	120
		IKK 5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Indeks	79,5	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	104,15
SK 5.2	Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut	IKK 5.2.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.2.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.2.3	Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	Nilai	80	0	0	82,79	82,79	82,79	103,48



		IKK 5.2.5	Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.2.6	Persentase Terselenggaranya Layanan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.2.7	Persentase Usulan Pemanfaatan Bmn Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.2.8	Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.2.9	Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (Psp Bmn) Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
SK 5.3	Terlaksananya pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi laut	IKK 5.3.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan	%	100	26,04	59,37	95,83	131	131	131%
		IKK 5.3.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100



		IKK 5.3.3	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Nilai	3,8	4.3	4.1	3.9	4.0	4.0	105
		IKK 5.3.4	Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial	%	100	25	49.16	76.11	103	103	103
		IKK 5.3.5	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100
SK 5.4	Terlaksananya pengelolaan legislasi dan litigasi transportasi laut	IKK 5.4.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.4.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan	%	100	100	100	100	92,9	92,9	92,9
		IKK 5.4.3	Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKK 5.4.4	Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut	%	100	100	100	100	100	100	100



		IKK 5.4.5	Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional	%	100					100	
--	--	-----------	--	---	-----	--	--	--	--	-----	--





C. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN 2.4

Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan penunjang teknis terhadap pelayanan transportasi laut terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

2.4.1 Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

- a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.1)

Tabel III.3.1 Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 2.4.1	Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Sub Bidang Data dan Informasi, Bagian Organisasi dan Humas.

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%, terdapat 3 kegiatan yaitu : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan serta Software Pengolah Data Survei, Maritime Hub (Satu portal layanan data) dan Pembangunan Sistem Informasi Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok (SIRIP). Adapun pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III terdapat realisasi 100% pada Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga prosentase terhadap target 100%.

Grafik III.3.1 Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi (IKK 2.4.1) :

Adapun realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya

Tabel III.3.2 Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data : Sub Bidang Data dan Informasi, Bagian Organisasi dan Humas



c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.1)**

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2.4.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data : Sub Bidang Data dan Informasi, Bagian Organisasi dan Humas

2.4.2. Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.2)**

Tabel III.3.4 Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

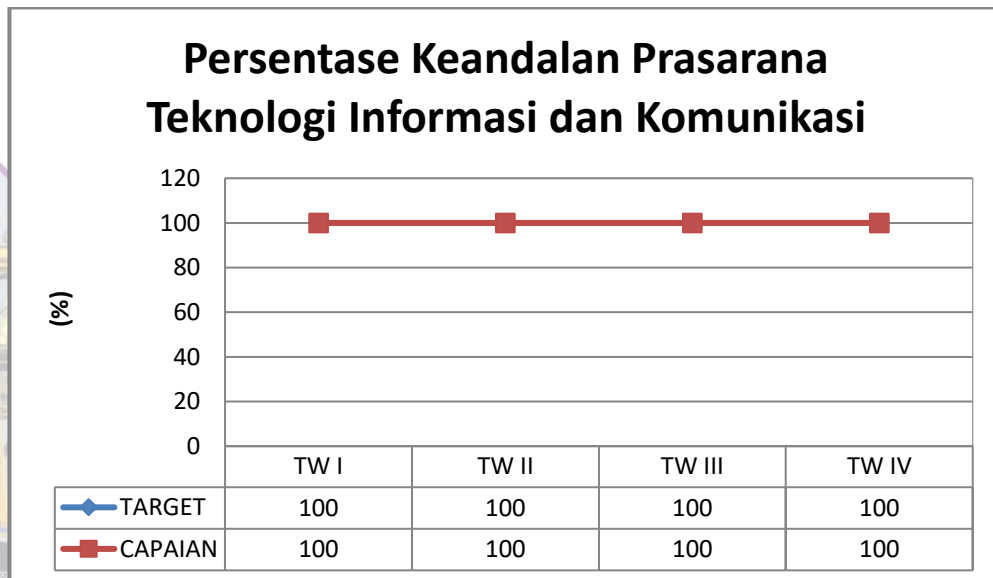
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 2.4.2	Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Sub Bidang Data dan Informasi, Bagian Organisasi dan Humas.



Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I, sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% pada Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga prosentase terhadap target 100%.

Grafik III.3.2 Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.2)

Adapun realisasi Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya



Tabel III.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.2)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKK 2.4.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sertifikat	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi, Bagian Organisasi dan Humas.



2.4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat.

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKK 2.4.3)

Tabel III.3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

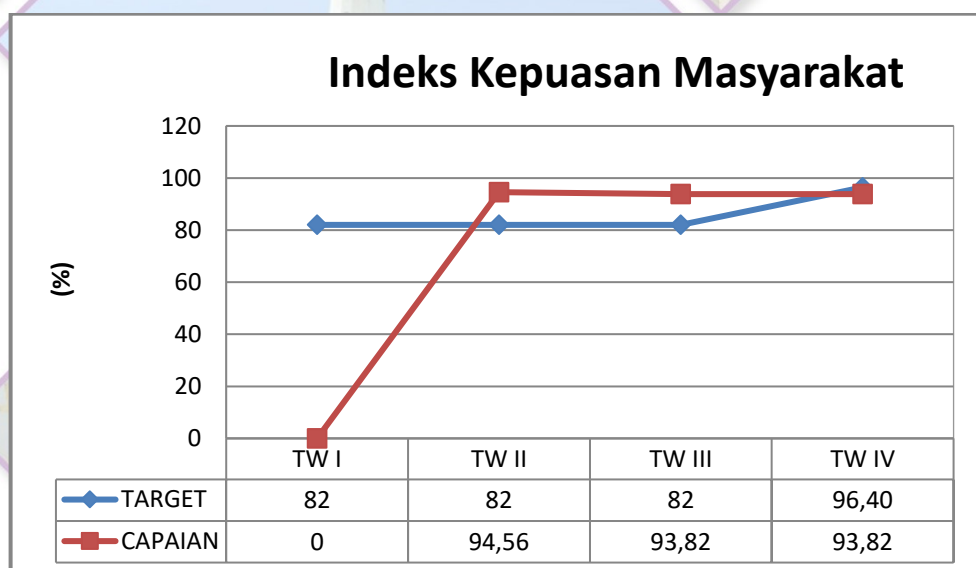
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	96.40	0	94,56	93,82	93,82	93,82	97,32

Sumber data :

Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi dan Triwulan II realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai target sebesar 94,56%, sehingga pencapaian kinerja sebesar 115,32%.

Terlihat pada Triwulan III dan Triwulan IV realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai indeks 93,82 terjadi penurunan pada Triwulan II ke Triwulan III dikarenakan ada responden yang menilai ketidakpuasan terhadap Waktu Penyelesaian dan Respon Petugas sehingga belum memenuhi target kinerja tahun 2025, dan pada Triwulan IV di bulan Desember terdapat perubahan Target Indikator dari yang sebelumnya 82 indeks menjadi 96,40%.

Grafik III.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKK 2.4.3)

Adapun realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya

Tabel III.3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKK 2.4.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Target	-	-	-	-	-	96,40
		Realisasi	-	-	-	-	-	93,82
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	97,32

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKK 2.4.3)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Indeks Kepuasan Masyarakat untuk target sebesar 96.40% sedangkan realisasinya sebesar 93,82% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 97,32% sehingga belum sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKK 2.4.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Target	96,40
		Realisasi	93,82
		Kinerja (%)	97,32

Sumber data :



SASARAN KEGIATAN 4

Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Dukungan Teknis Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Yang Baik** terdiri dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

4.1 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan (IKK 4.1)

Tabel III.3.10 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4.1	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

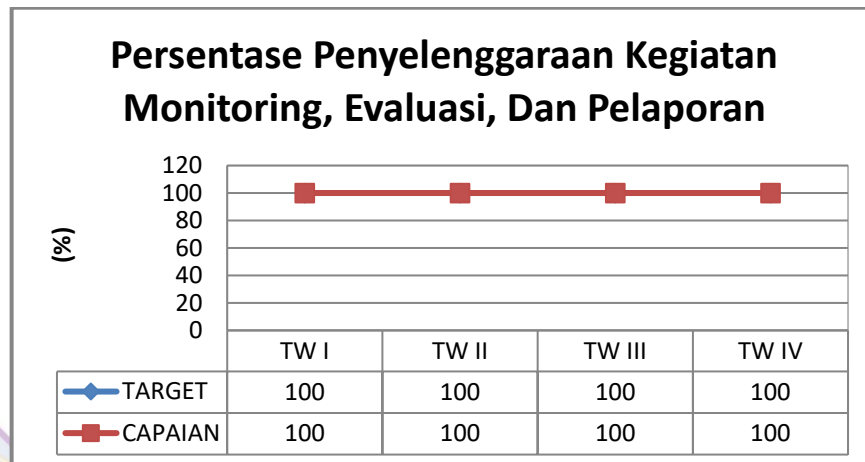
Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Yang Baik merupakan ukuran kinerja untuk berbagai kegiatan dukungan teknis berupa kegiatan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian, serta Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan dan keamanan pelayaran adapun tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diukur dengan membandingkan antara realisasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dukungan teknis (Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan) di setiap bidang transportasi laut.



Tabel III.3.11 Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

No	Kegiatan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT			
		Target	Realisasi	%	Ket
1.	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	100	100	100	
2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	100	100	100	
3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan kegiatan pendukung	100	100	100	
5	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	100	100	100	
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	94	94	100	
7	Persentase penyelenggaraan layanan internal	100	100	100	
8	Persentase penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	
9	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	100	100	100	

Grafik III.3.4 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan (IKK 4.1) :

Adapun realisasi Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan (IKK4.1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan (IKK 4.1)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan (IKK 4.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data :

4.2 Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja.

a)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja (IKK 4.2)

Tabel III.3.14 Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 4.2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :



Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% pada Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sehingga prosentase terhadap target 100%.

Grafik III.3.5 Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja (IKK4.2)

Adapun realisasi Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja (IKK 4.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja	%	Target	100	-	-	-	-	100
		Realisasi	100	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	100	-	-	-	-	100

Sumber data :



c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja (IKK 4.2)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja (IKK 4.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja	%	Target	30
		Realisasi	30
		Kinerja (%)	100

Sumber data :

4.3 Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK (IKK 4.3)

Tabel III.3.17 Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK

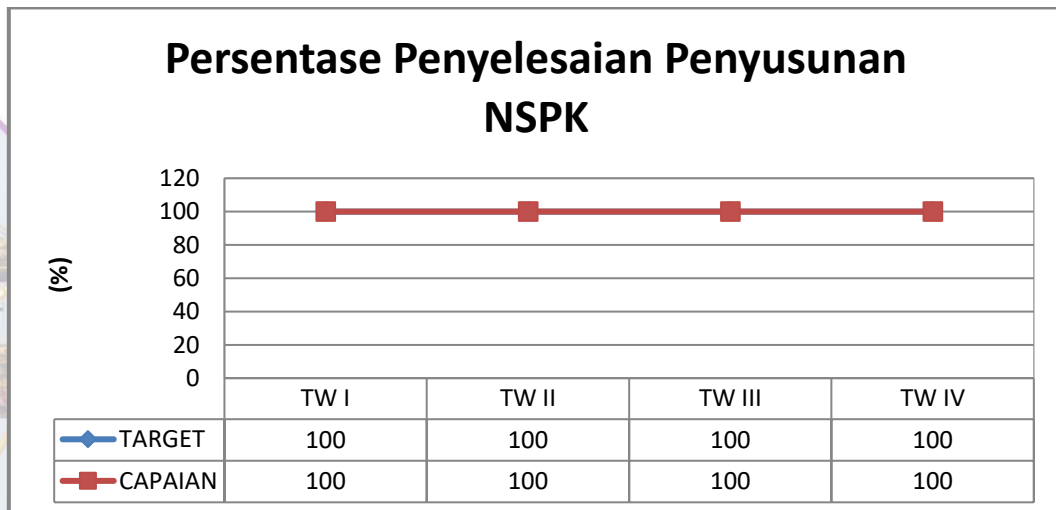
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :



Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Kepatuhan Pelaporan Kinerja, sehingga prosentase terhadap target 100%.

Grafik III.3.6 Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK (IKK 4.3)

Adapun realisasi Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK (IKK 4.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK (IKK 4.3)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK (IKK 4.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data :

4.4 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung.

a)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pendukung (IKK 44)

Tabel III.3.20 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung.

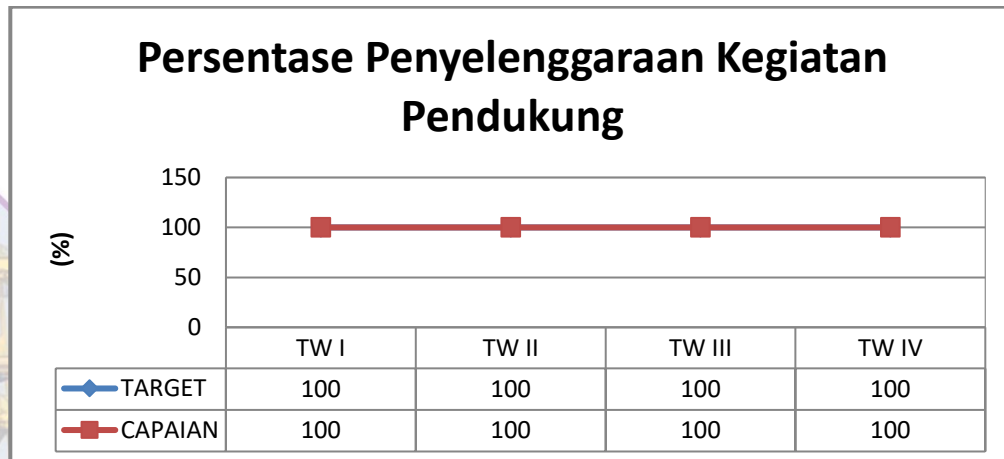
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4.4	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung	Nilai	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data :



Untuk Tahun 2025 target dari Persentase Pencapaian PNBP sebesar 100. Terlihat pada Triwulan I. Sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi kinerja adalah 100, hal ini menunjukkan bahwa target PNBP tercapai dengan baik.

Grafik III.3.7 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung (IKK 4.4)

Adapun realisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung (IKK 4.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung	Nilai	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung (IKK 4.4)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung (IKK 4.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung	Nilai	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data :

4.5 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (IKK 4.5)

Tabel III.3.23 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

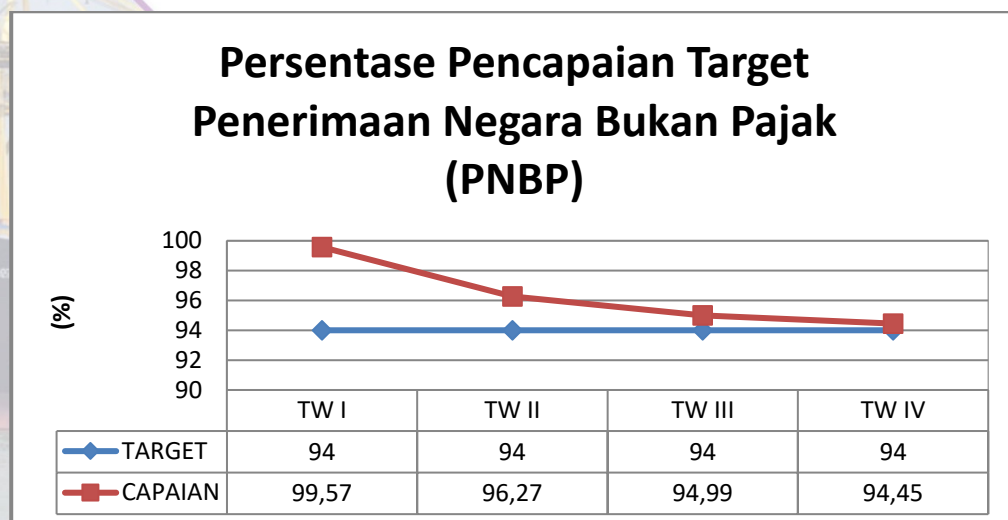
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4.5	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	94	85,37	85,37	94,95	94,95	94,95	101,01

Sumber data :



Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun anggaran 2025 sebesar 94% yang merupakan hasil perhitungan indikator pelaksanaan anggaran berdasarkan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II terdapat realisasi IKPA sebesar 99.56% dan 96.17%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Maret 2025, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 102.31% dan Triwulan III terdapat realisasi IKPA sebesar 94,95%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 1 Oktober 2025, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 101,01%.

Grafik III.3.8 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (IKK 4.5)

Adapun realisasi Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.



Tabel III.3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (IKK 4.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	Target	-	-	-	-	-	94
		Realisasi	-	-	-	-	-	94,95
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	101,01

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (IKK 4.5)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah melebihi dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (IKK 4.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	Target	94
		Realisasi	94,95
		Kinerja (%)	101,01

Sumber data :



4.6 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (IKK 4.6)

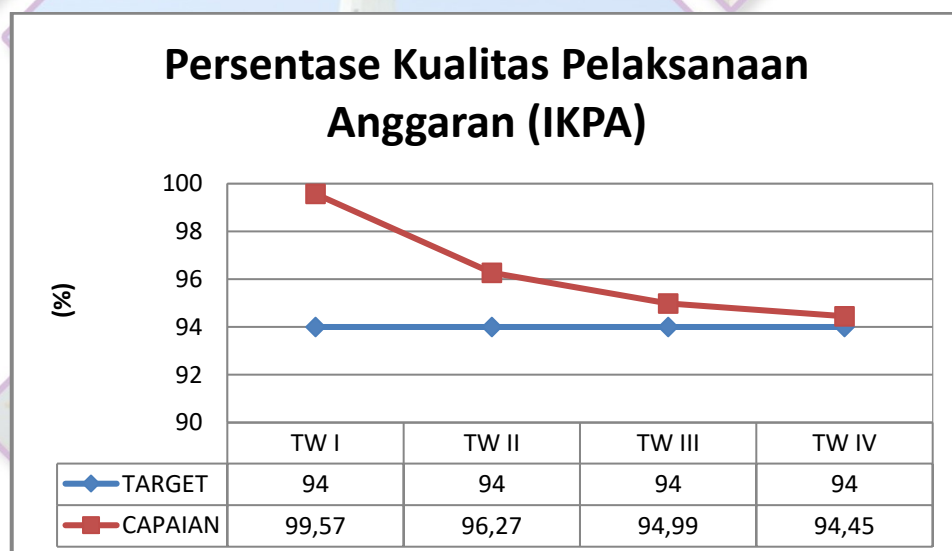
Tabel III.3.26 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 4.6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	94	99,57	96,27	94,99	94,45	94,45	100,48

Sumber data :

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (KPA) tahun anggaran 2025 sebesar 94% yang merupakan hasil perhitungan indikator pelaksanaan anggaran berdasarkan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III terdapat persentase KPA sebesar 99,57% dan 96,27%, dan 94,99% yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sedangkan Triwulan IV terdapat persentase KPA sebesar 94,45%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 5 Januari 2026, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 100,48%.

Grafik III.3.9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (IKK 4.6)

Adapun realisasi kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (IKK 4.6)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	94
		Realisasi	-	-	-	-	-	94.45
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100.48

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (IKK 4.6)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk target sebesar 94% sedangkan realisasinya sebesar 94.45% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100.48% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (IKK 4.6)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	Target	94
		Realisasi	94.45
		Kinerja (%)	100.48

Sumber data :



4.7 Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025
Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal (IKK 4.7)

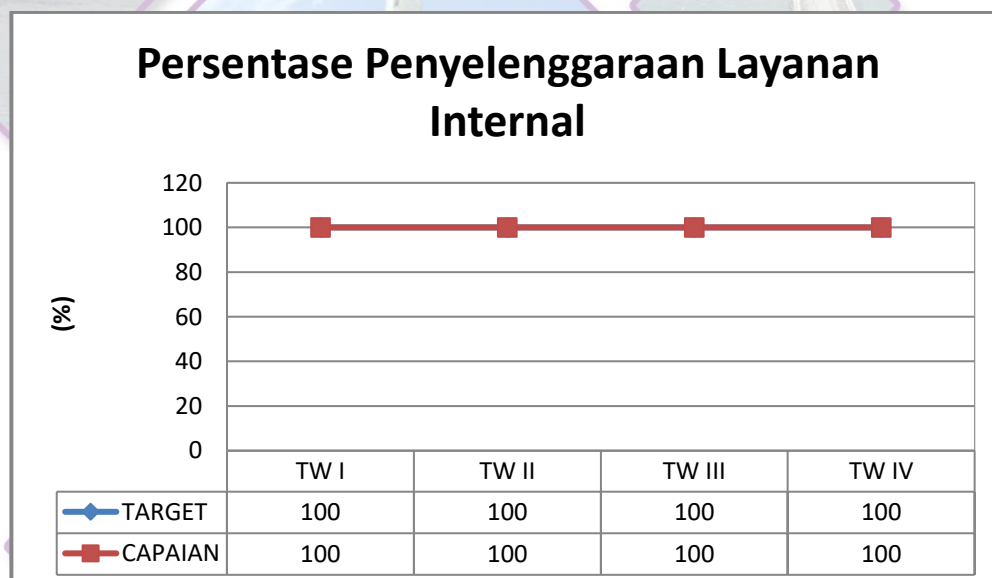
Tabel III.3.30 Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 4.7	Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Untuk Tahun 2025 target dari Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal sebesar 100. Terlihat pada Triwulan I. Sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi kinerja adalah 100, hal ini menunjukkan bahwa target Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal tercapai dengan baik.

Grafik III.3.10 Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal (IKK 4.7)

Adapun realisasi Persentase Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal (IKK 4.7)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal (IKK 4.7)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal (IKK 4.7)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

4.8 Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum.

- a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum (IKK 4.8)

Tabel III.3.33 Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 4.8	Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100	100	100

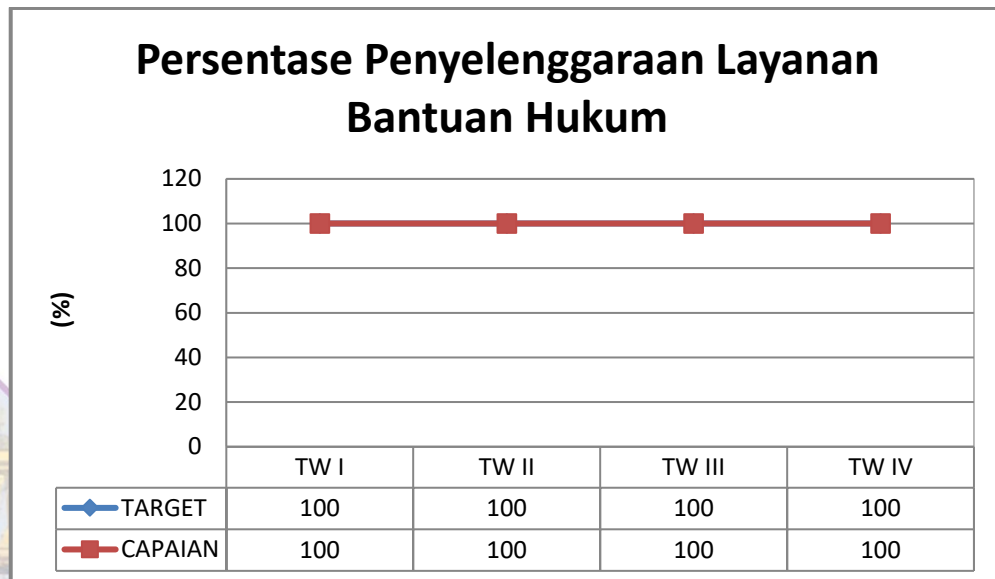
Sumber data : Sub Bidang Data dan Informasi, Bagian Sub Bidang Advokasi dan Perjanjian Nasional, Bagian Hukum dan KSLN

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk persentase Layanan Bantuan Hukum sebesar 100% untuk 12 kegiatan. Pada Triwulan I terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, pada Triwulan II terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, pada Triwulan III terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, pada Triwulan IV terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100% sehingga total kegiatan sampai dengan triwulan IV sejumlah 12 (dua belas) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



1. Menghadiri Sidang Perkara Tata Usaha Negara Padang Nomor 21/G/2024/PTUN.PDG dengan agenda Pemeriksaan Saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V atas Gugatan Koperasi TKBM Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang bulan Januari 2025;
2. Menyusun kesimpulan Perkara Tata Usaha Negara Padang Nomor 21/G/2024/PTUN.PDG atas Gugatan Koperasi TKBM Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang bulan Februari 2025;
3. Menyiapkan daftar bukti Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2024/PN.Trg untuk Gugatan Class Action antara Bacotang, dkk selaku Para Penggugat melawan PT. Bintang Kartika Segara, dkk selaku Para Tergugat, dan dalam hal ini Menteri Perhubungan sebagai Tergugat XXVI dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda sebagai Tergugat XXVI bulan Maret 2025;
4. Melakukan Pembahasan Penyusunan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Perkara TUN Nomor 3/G/2025/PTUN.GTO pada tanggal 28 s.d. 30 April 2025;
5. Melakukan Pembahasan Penyusunan Daftar Bukti Tergugat II Intervensi dalam Perkara TUN Nomor 3/G/2025/PTUN.GTO pada tanggal 26 s.d. 28 Mei 2025;
6. Menghadiri Sidang Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 3/G/2025/PTUN.GTO dengan Agenda Pemeriksaan Setempat dan Saksi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 s.d. 5 Juni 2025;
7. Menghadiri Sidang Perkara Perdata Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN.Trg dengan agenda pembacaan gugatan pada tanggal 31 Juli 2025;
8. Menghadiri Sidang Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.G/2025/PN.Sos dengan agenda mediasi pada tanggal 11 Agustus 2025;
9. Melakukan Pendampingan Hukum di Ditpolairud Polda Jatim terhadap ASN Kementerian Perhubungan atas nama Frandy Irawan, SH, terkait dengan Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada tanggal 15 s.d. 17 September 2025;
10. Melakukan Penyusunan Daftar Bukti Tambahan Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Sos pada tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2025;
11. Melakukan Pembahasan Penyusunan Kesimpulan Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Sos pada tanggal 18 November 2025;
12. Melakukan Pendampingan kepada Sdr. Baitul Makmur (selaku Plt. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan) dan Sdr. Raden Ismail (selaku mantan Pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan) terkait Penyelidikan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Melakukan Penutuhan Kapal Dengan Tidak Memenuhi Persyaratan Perlindungan Lingkungan Maritim pada tanggal 29 s.d. 30 Desember 2025

Grafik III.3.11 Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum (IKK 4.8)

Adapun realisasi kinerja Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum (IKK 4.8)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum (IKK 4.8)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum dengan target sebesar sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III.3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum (IKK 4.8)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data :

4.10 Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL.

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL (IKK 4.10)

Tabel III.3.36 Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4.10	Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM	%	100	100	100	100	100	100	100

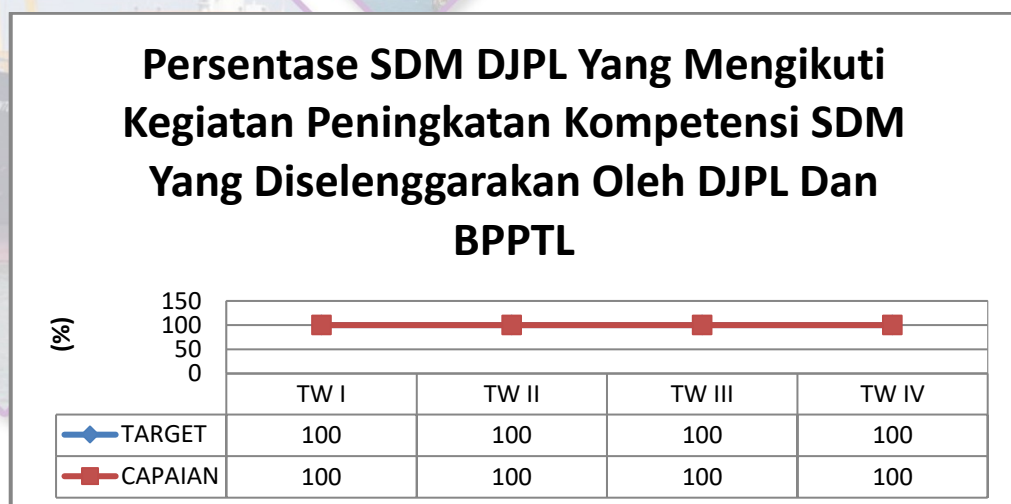


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL								

Sumber data :

Untuk Tahun 2025 target dari Persentase Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal sebesar 100 Terlihat pada Triwulan I Sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi kinerja adalah 100, hal ini menunjukkan bahwa target Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL tercapai dengan baik

Grafik III.3.12 Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL (IKK 4.10)

Adapun realisasi Persentase Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.



Tabel III.3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL (IKK 4.10)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL (IKK 4.10)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan

Tabel III.3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL (IKK 4.10)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data :



SASARAN KEGIATAN 5.1

Sasaran Kegiatan **Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut** terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

5.1.1 Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM.

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM (IKK 5.1.1)

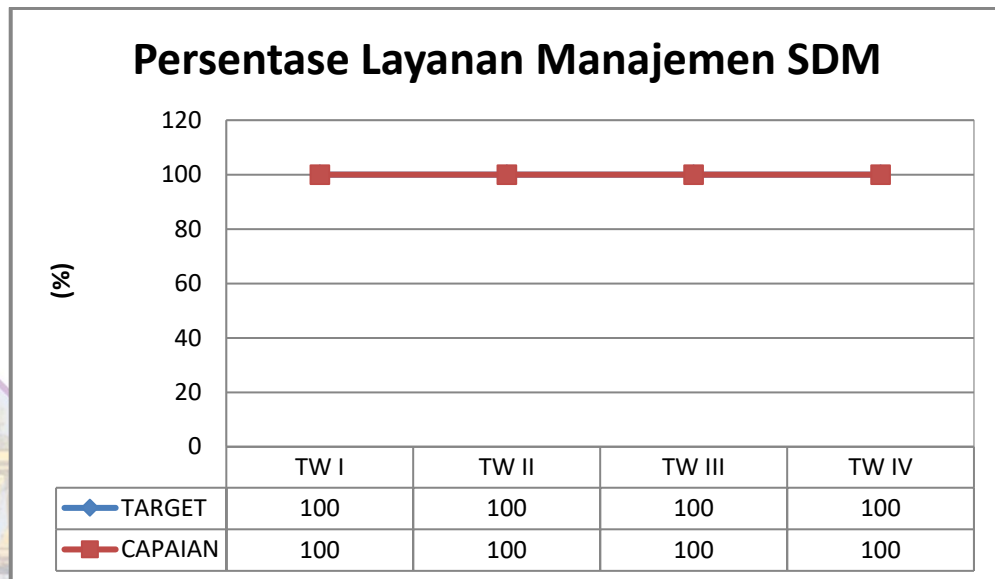
Tabel III.3.39 Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.1.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Sub Bidang Mutasi, Bagian SDM

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Pada tahun 2025, Bagian Sumber Daya Manusia telah melaksanakan mutasi Pejabat Struktural pada tanggal 9 Mei 2025 sebanyak 235 pegawai yang terdiri dari pejabat Eselon I, II, III dan IV. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan pra assessment test sebanyak dua (2) batch dengan total peserta 149 orang dan assessment test sebanyak empat (4) batch dengan total peserta 46 orang. Selanjutnya usulan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan fungsional umum yang telah diproses sebanyak 608 dokumen usulan dan penerbitan SK jabatan pelaksana sebanyak 13.421. Selanjutnya pemindahan/mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 82 orang pada triwulan I, 75 orang pada triwulan II, 49 orang pada triwulan III dan 34 orang pada triwulan IV. Seluruh kegiatan tercapai dengan realisasi sebesar 100%.

Grafik III.3.13 Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM (IKK 5.1.1)

Adapun Realisasi Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM Setiap Tahun Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan.

Tabel III.3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM (IKK 5.1.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM (IKK 5.1.1)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM untuk target di Tahun 2025 sebesar 100 sehingga Capaian Kinerja terhadap target sebesar 100%

Tabel III.3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM (IKK 5.1.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data :

5.1.2 Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal.

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola (IKK 5.1.2)

Tabel III.3.42 Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal

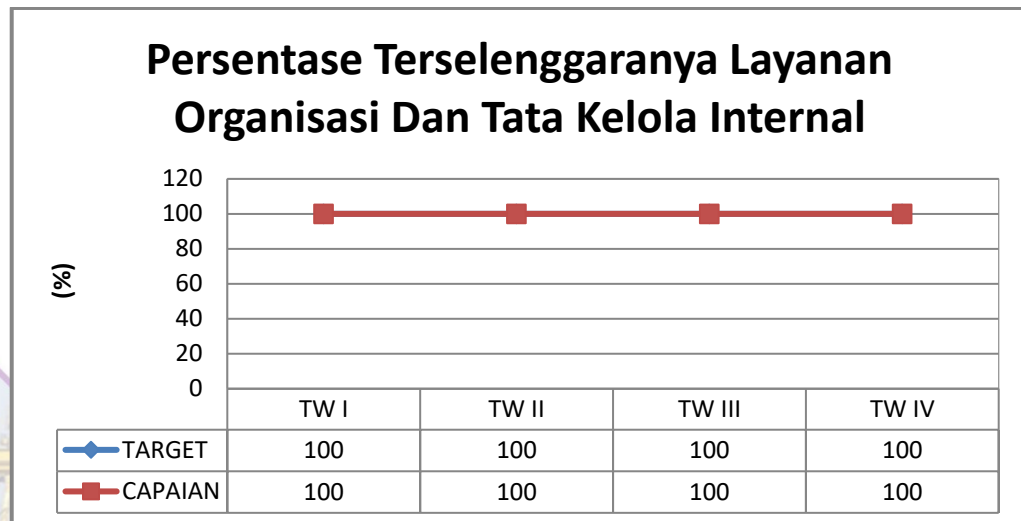
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.1.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I, sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%



Grafik III.3.14 Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal (IKK 5.1.2)

Adapun realisasi Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal (IKK 5.1.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal (IKK 5.1.2)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan

Tabel III.3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal (IKK 5.1.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data :

5.1.3 Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM (IKK 5.1.3)

Tabel III.3.45 Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 5.1.3	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :



Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.14 Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM (IKK 5.1.3)

Adapun realisasi Persentase Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM (IKK 5.1.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM (IKK 5.1.3)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan

Tabel III.3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM (IKK 5.1.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.1.4 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.4)

Tabel III.3.48 Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.1.4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	0	68,6	0	51,5	120	120

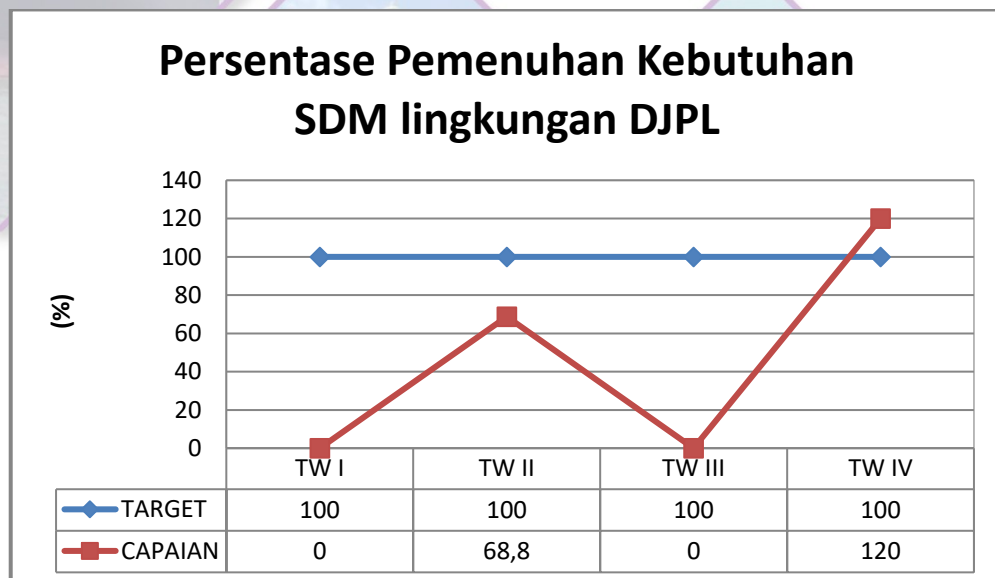
Sumber data : Sub Bidang Rencana Pengembangan Pegawai, Bagian SDM



Adapun pemenuhan kebutuhan SDM DJPL sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan DJPL tahun 2025 dipenuhi dengan pelaksanaan perekrutan ASN yang formasinya telah ditetapkan sebanyak 4602 untuk PPPK, 817 formasi untuk CPNS umum, dan 983 formasi untuk CPNS jalur pola pembibitan (Polbit) sehingga total formasi yang didapatkan sebanyak 6402 formasi. Setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan, calon ASN yang berhasil direkrut dan diangkat berdasarkan SK pengangkatan sebanyak 3822 pegawai untuk PPPK Tahap I dan CPNS umum sebanyak 574 pegawai dimana SK pengangkatannya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni 2025, sehingga pemenuhan kebutuhan SDM yang berhasil direkrut sebanyak 4396 pegawai dan jumlah tersebut pada triwulan II setara dengan 68,6% dari target pemenuhan kebutuhan SDM.

Selanjutnya pada triwulan IV tahun 2025 terdapat pengangkatan PPPK Tahap II sebanyak 672 pegawai TMT 1 Oktober 2025, PPPK Paruh Waktu sebanyak 1646 pegawai TMT 1 Oktober 2025 serta CPNS Polbit sebanyak 983 pegawai TMT 1 Desember 2025 sehingga pemenuhan kebutuhan SDM di triwulan IV tahun 2025 sebanyak 3301 yang setara dengan 51,5% dari target pemenuhan kebutuhan SDM. Total realisasi pemenuhan kebutuhan SDM tahun 2025 sebanyak 7697 dengan persentase pemenuhan sebesar 120,1% dari target yang ditetapkan.

Grafik III.3.15 Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.4)



Adapun realisasi kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	120
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	120

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.4)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk target di Tahun 2025 sebesar 100% dan telah melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 120%.

Tabel III.3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	Target	100
		Realisasi	120
		Kinerja (%)	120

Sumber data



5.1.5 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.5)

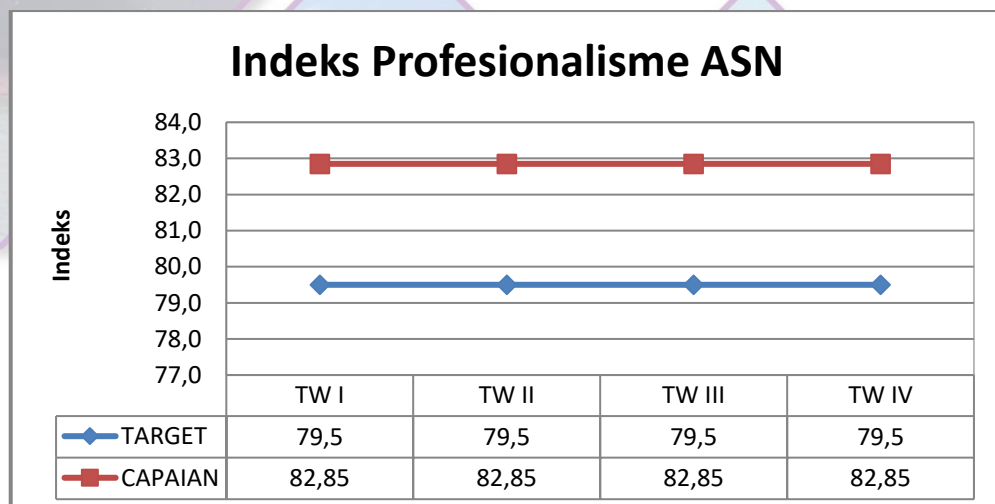
Tabel III.3.51 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Indeks	79,5	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	104,15

Sumber data : Bidang Disiplin pemberhentian dan Kesejahteraan, Bagian Sumber Daya Manusia

Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan II realisasi Indeks profesionalisme ASN mencapai target sebesar 82,85%, sehingga pencapaian kinerja juga 100%.

Grafik III.3.16 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.5)

Adapun realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	79,5
		Realisasi	-	-	-	-	-	82,85
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	104,15

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.5)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk target di Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 82,85 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 104,15

Tabel III.3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKK 5.1.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	Target	79,5
		Realisasi	82,85
		Kinerja (%)	104,15

Sumber data



SASARAN KEGIATAN 5.2

Sasaran Kegiatan **Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut** terdiri dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut

5.2.1 Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan.

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan (IKK 5.2.1)

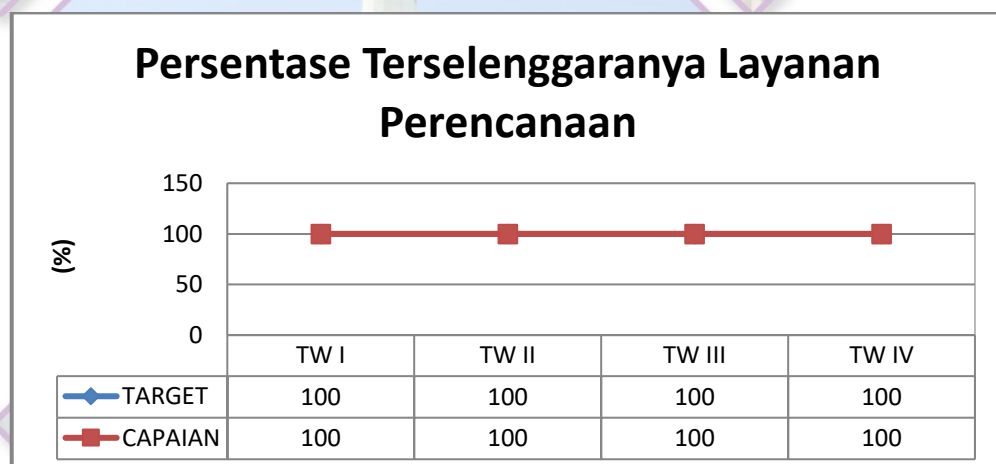
Tabel III.3.54 Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 5.2.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.17 Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan (IKK 5.2.1)

Adapun realisasi Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan (IKK 5.2.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan (IKK 5.2.1)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan



Tabel III.3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan (IKK 5.2.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.2.2 Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase terselenggaranya layanan anggaran (IKK 5.2.3)

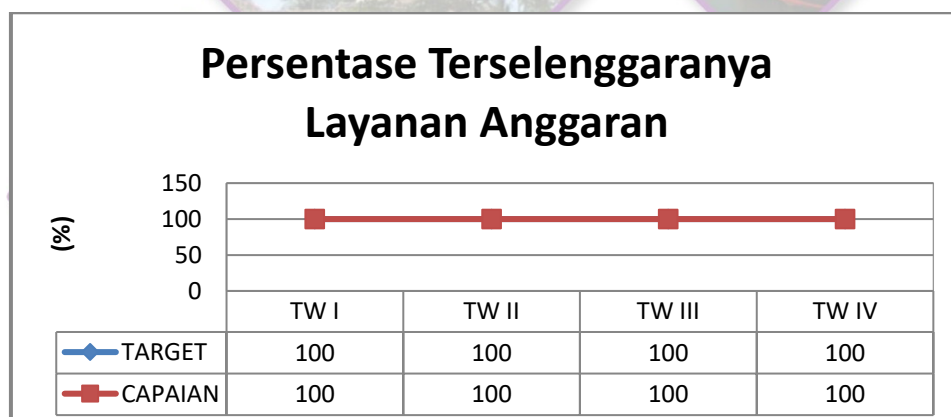
Tabel III.3.57 Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.17 Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran (IKK 5.2.2)

Adapun realisasi Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran (IKK 5.2.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran (IKK 5.2.2)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan



Tabel III.3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran (IKK 5.2.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.2.3 Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi.

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi i (IKK 5.2.3)

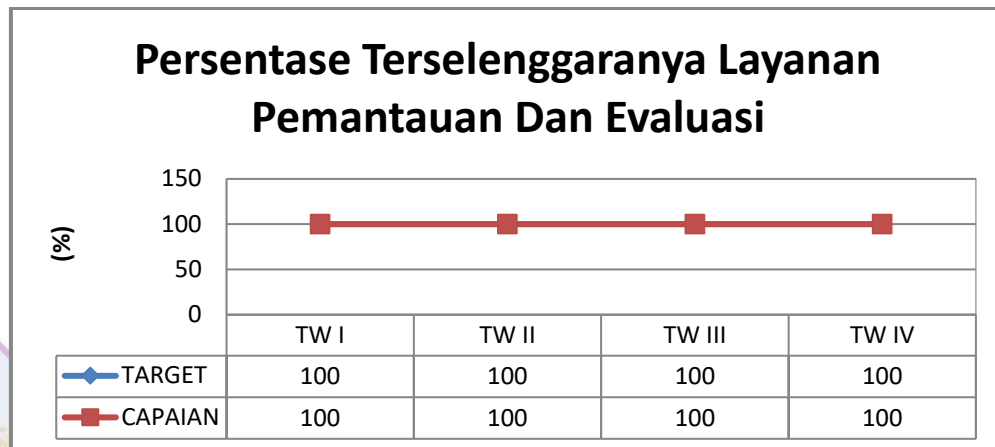
Tabel III.3.59 Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.3	Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.17 Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi (IKK 5.2.3)

Adapun realisasi Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun - tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi (IKK 5.2.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi Pemantauan Dan Evaluasi	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi (IKK 5.2.3)



Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan

Tabel III.3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi (IKK 5.2.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.2.4 Nilai AKIP (Unit Kerja)

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP (Unit Kerja) (IKK 5.2.4)

Tabel III.3.61 Nilai AKIP (Unit Kerja)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	%	80	0	0	82,79	82,79	82,79	103,48

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tahun 2025 target nilai AKIP Setditjen Hubla sebesar 80 nilai, Adapun pada Triwulan I dan Triwulan II realisasi Nilai AKIP Setditjen Hubla belum dilaksanakan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub, sehingga pencapaian kinerja sebesar 0%. Pada Triwulan III tepatnya di Bulan Agustus telah dilaksanakan Evaluasi dan Penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub. Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh nilai sebesar 82,79 sehingga prosentasi pencapaian kinerjanya sebesar 100,96. Nilai tersebut Pada Tahun 2025 target nilai AKIP Setditjen Hubla



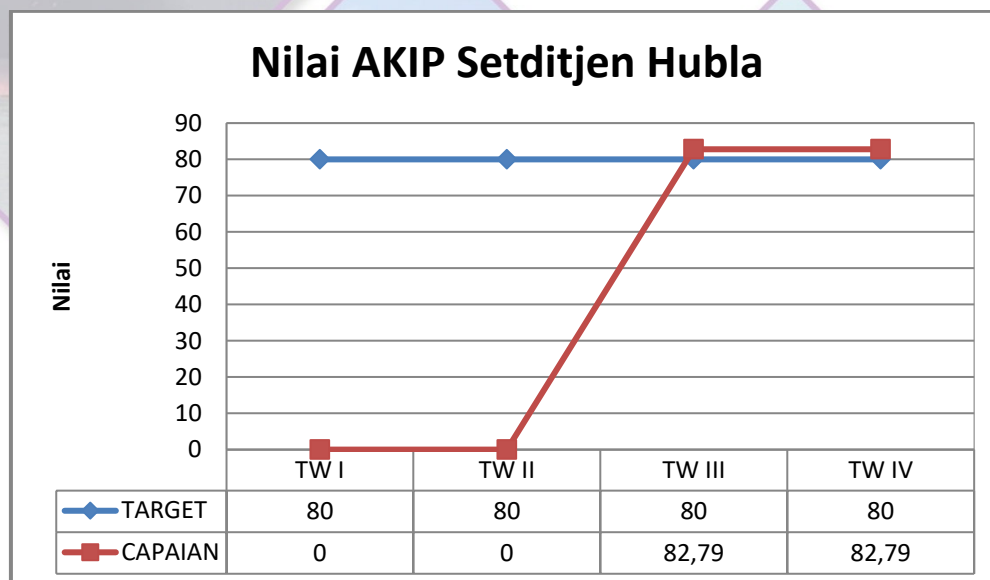
sebesar 80 nilai, Adapun pada Triwulan I dan Triwulan II realisasi Nilai AKIP Setditjen Hubla belum dilaksanakan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub, sehingga pencapaian kinerja sebesar 0%. Pada Triwulan III tepatnya di Bulan Agustus telah dilaksanakan Evaluasi dan Penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub. Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh nilai sebesar 82,79 sehingga prosentasi pencapaian kinerjanya sebesar 100,96 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Manajemen Kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.3.62 Komponen Penilaian Dokumen SAKIP

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,05
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,29
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,25
Nilai Hasil Evaluasi			82,79
Predikat			A

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Grafik III.3.18 Nilai AKIP (Unit Kerja)





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP (Unit Kerja) (IKK 5.2.4)

Adapun realisasi kinerja Pencapaian Target Kegiatan Nilai AKIP setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP (Unit Kerja) (IKK 5.2.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP (Unit Kerja)	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	80
		Realisasi	-	-	-	-	-	82,79
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	103,48

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP (Unit Kerja) (IKK 5.2.4)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Kegiatan Nilai AKIP untuk target di Tahun 2025 sebesar 80 dan untuk realisasinya mencapai 82,79 sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 103,48%

Tabel III.3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Nilai AKIP (Unit Kerja) (IKK5.2.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Nilai AKIP (Unit Kerja)	%	Target	80
		Realisasi	82,79
		Kinerja (%)	103,48

Sumber Data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



5.2.5 Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran.

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran (IKK 5.2.5)

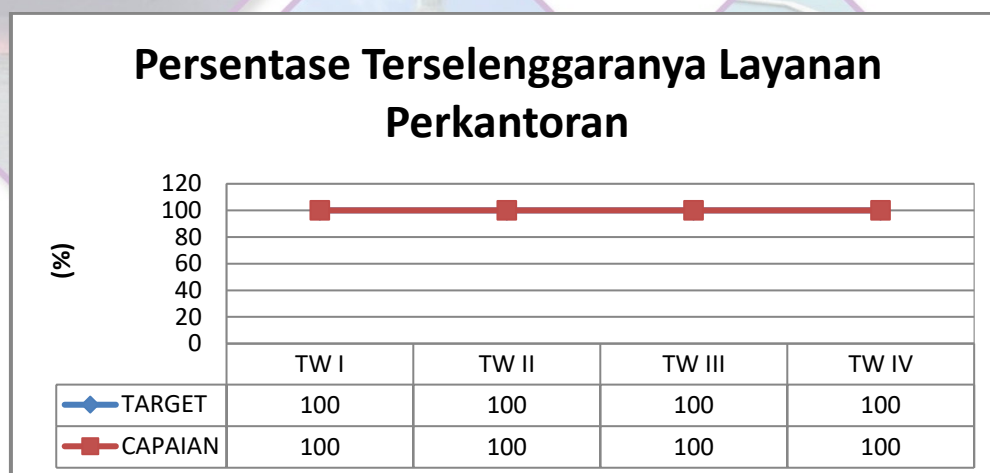
Tabel III.3.65 Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.5	Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi 100% Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.19 Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran (IKK 5.2.5)

Adapun realisasi Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.66 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran (IKK 5.2.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran (IKK 5.2.5)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran (IKK 5.2.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber Data :

5.2.6 Persentase Terselenggaranya Layanan Umum

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Umum (IKK 5.2.6)

Tabel III.3.68 Persentase Terselenggaranya Layanan Umum

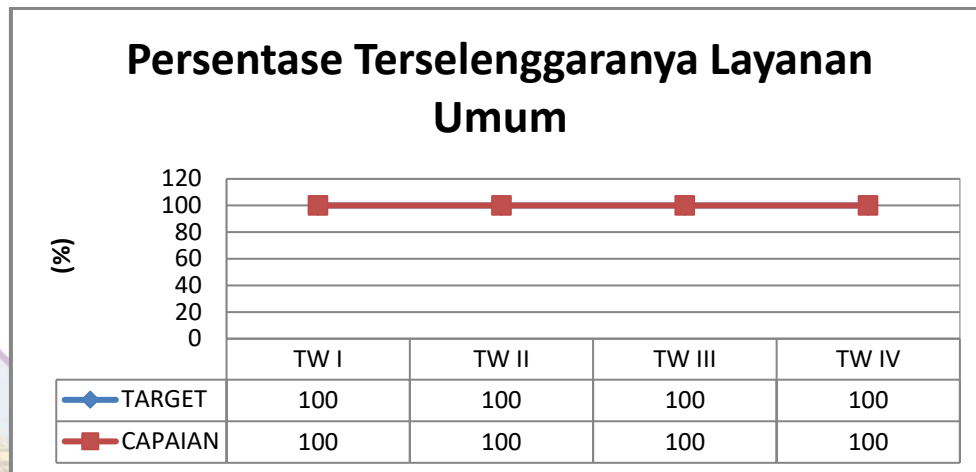
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.6	Persentase Terselenggaranya Layanan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi 100% Persentase Terselenggaranya Layanan Umum sehingga prosentase terhadap target 100%



Grafik III.3.20 Persentase Terselenggaranya Layanan Umum



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Umum (IKK 5.2.6)

Adapun realisasi Persentase Terselenggaranya Layanan Umum pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Umum (IKK 5.2.6)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Umum	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Umum (IKK 5.2.6)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Umum untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan

Tabel III.3.70 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Umum (IKK5.2.6)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Umum	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber Data :

5.2.7 Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.7)

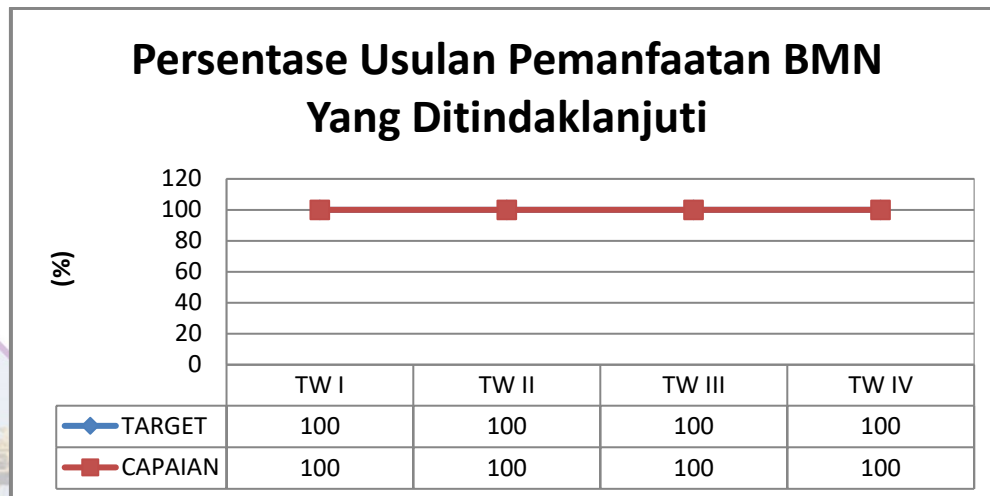
Tabel III.3.71 Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.7	Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.21 Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.7)

Adapun realisasi Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.72 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.7)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.7)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan

Tabel III.3.73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.7)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.2.8 Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan (IKK 5.2.8)

Tabel III.3.74 Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.8	Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data :



Adapun realisasi Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya

Grafik III.3.22 Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan (IKK 5.2.8)

Adapun realisasi Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.75 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan (IKK 5.2.8)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan (IKK 5.28)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.76 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan (IKK 5.2.8)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.2.9 Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.9)

Tabel III.3.77 Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.2.9	Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.23 Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.9)

Adapun realisasi Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.



Tabel III.3.78 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.9)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.9)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan



Tabel III.3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti (IKK 5.2.9)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

SASARAN KEGIATAN 5.3

Sasaran Kegiatan **Terlaksananya Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Transportasi Laut** terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut

5.3.1 Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan (IKK 5.3.1)

Tabel III.3.80 Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.3.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan	%	100	26,04	59,37	95,83	131	131	131%

Sumber Data : Sub Bagian Humas, Bagian Humas dan Umum

Pada tahun 2025 target Presentase Layanan Kehumasan sebesar 100 % dari 96 siaran pers dalam satu tahun. Siaran pers yang diterbitkan oleh Bagian Organisasi dan Humas merupakan pernyataan resmi

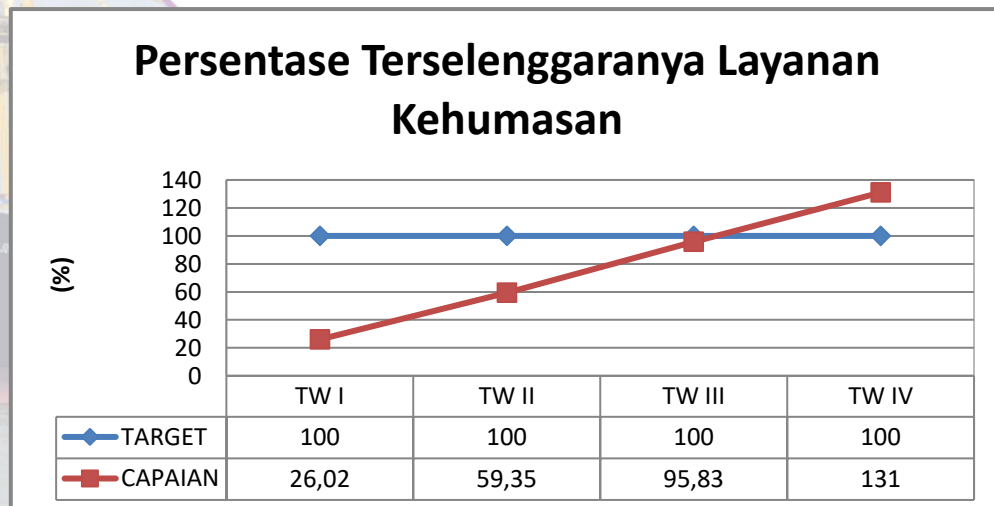


yang disampaikan kepada jurnalis atau media dengan tujuan memberikan informasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun pada Triwulan I – IV telah menerbitkan sebanyak 126 siaran pers, yaitu Januari sebanyak 10 siaran pers, Februari sebanyak 4 siaran pers, Maret sebanyak 11 siaran pers, April sebanyak 6 siaran pers, Mei sebanyak 14 siaran pers, Juni sebanyak 12 siaran pers, Juli sebanyak 18 siaran pers, Agustus sebanyak 5 siaran pers, September sebanyak 12 siaran pers, Oktober sebanyak 5 siaran pers, November sebanyak 16 siaran pers dan Desember sebanyak 13 siaran pers.

Berdasarkan tabel Presentase Layanan Kehumasan, pada Triwulan I terlihat realisasi kinerja sebesar 26,04%, Triwulan II sebesar 59,37%, Triwulan III sebesar 95,83% dan Triwulan IV sebesar 131%

Grafik III.3.24 Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan (IKK 5.3.1)

Adapun realisasi kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.81 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan (IKK 5.3.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	131
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	131

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan (IKK 5.3.1)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Pencapaian Pencapaian Target

Tabel III.3.82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan (IKK 5.3.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan	%	Target	100
		Realisasi	131
		Kinerja (%)	131

Sumber Data



5.3.2 Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi (IKK 5.3.2)

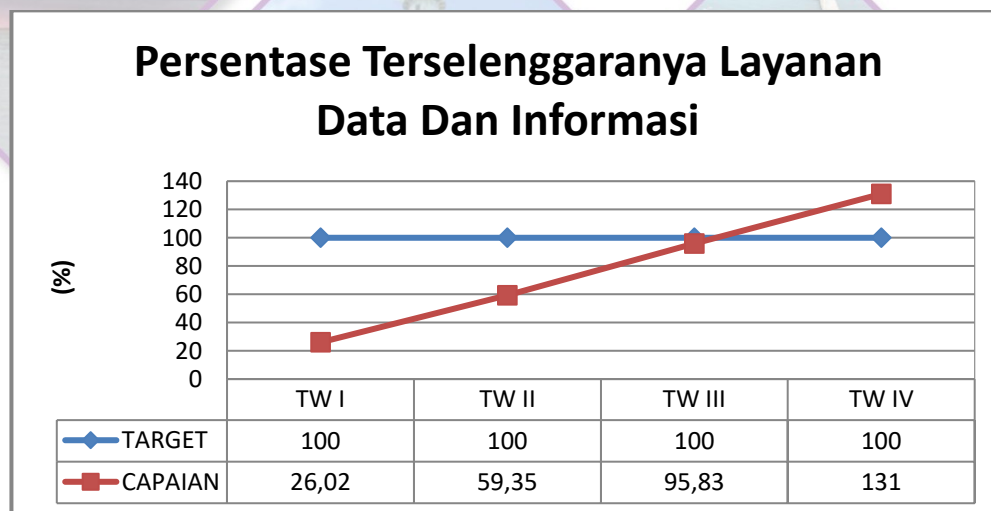
Tabel III.3.83 Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.3.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.25 Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi (IKK 5.3.2)

Adapun realisasi Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi (IKK 5.3.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi (IKK 5.3.2)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan



Tabel III.3.85 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi (IKK 5.3.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.3.3 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik (IKK 5.3.3)

Tabel III.3.86 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK. 5.3.3	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Nilai	3.8	4.3	4.1	3.9	4.0	4.0	105

Sumber data : Sub Bagian Humas, Bagian Humas dan Umum

Pada tahun 2025 target Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik sebesar 3,8 Skala Likert dengan nilai maksimal 5 skala likert.

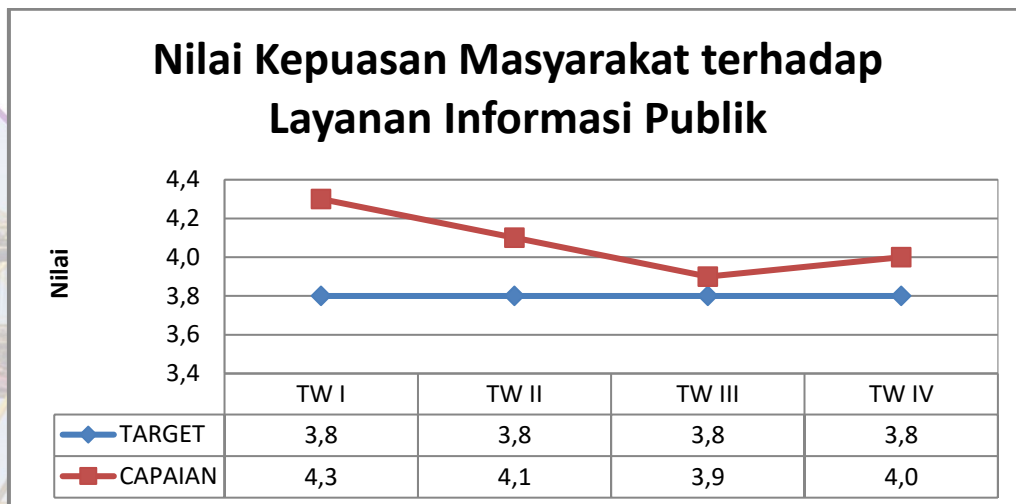
Adapun rentang nilai 1 sampai dengan 5 dengan kategori, yaitu nilai 1 adalah kategori sangat buruk, nilai 2 adalah kategori buruk, nilai 3 adalah kategori cukup, nilai 4 adalah kategori baik dan nilai 5 adalah kategori sangat baik.

Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum dengan cara memberikan kuesioner kepada 10 (sepuluh) orang responden yang telah melakukan permohonan informasi.



Berdasarkan tabel Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik, pada Triwulan I terlihat realisasi kinerja sebesar 4,3 Skala Likert, Triwulan II sebesar 4,1 Skala Likert, Triwulan III sebesar 3,9 Skala Likert dan Triwulan IV sebesar 4,0 Skala Likert

Grafik III.3.26 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik (IKK 5.3.3)

Adapun realisasi kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.87 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik (IKK 5.3.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	3.8
		Realisasi	-	-	-	-	-	4.0
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	105

Sumber Data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik (IKK 5.3.3)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Pencapaian Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik telah mencapai target Capaian Kinerja sebesar 105%

Tabel III.3.88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik (IKK 5.3.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	%	Target	3.8
		Realisasi	4.0
		Kinerja (%)	105

Sumber data

5.3.4 Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial (IKK 5.3.4)

Tabel III.3.89 Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.3.4	Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial	%	100	25	49.16	76.11	103	103	103

Sumber data : Sub Bagian Humas, Bagian Humas dan Umum

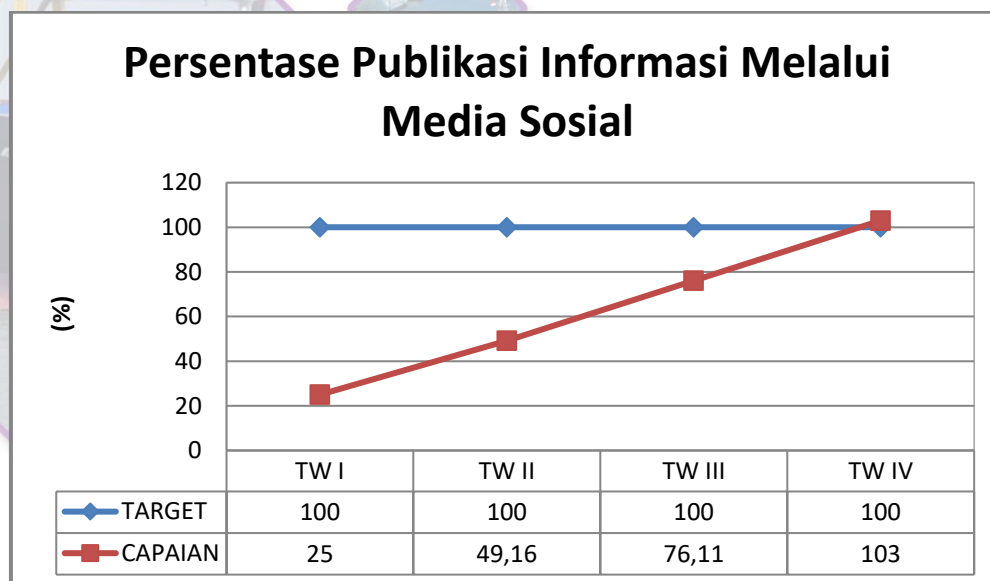


Pada Tahun 2025 target Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial sebesar 100% dari 360 konten. Dalam mempublikasikan informasi terkait capaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut salah satunya dilakukan melalui kanal media sosial **@djplkemenhub151**.

Adapun pada Triwulan I - IV telah membuat sebanyak 371 konten yang telah diposting melalui Instagram, yaitu Januari sebanyak 31 konten, Februari sebanyak 26 konten, Maret sebanyak 33 konten, April sebanyak 30 konten, Mei sebanyak 29 konten, Juni sebanyak 28 konten, Juli sebanyak 33 konten, Agustus sebanyak 33 konten, September sebanyak 31 konten, Oktober sebanyak 30 konten, November sebanyak 31 konten dan Desember sebanyak 36 konten.

Berdasarkan tabel Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial, pada Triwulan I terlihat realisasi kinerja sebesar 25%, Triwulan II sebesar 49,16%, Triwulan III sebesar 76,11% dan Triwulan IV sebesar 103%.

Grafik III.3.27 Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial (IKK 5.3.4)

Adapun realisasi kinerja Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.90 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial (IKK 5.3.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	103
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	103

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial (IKK 5.3.4)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial telah melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 103%

Tabel III.3.91 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial (IKK 5.3.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial	%	Target	100
		Realisasi	103
		Kinerja (%)	103

Sumber data



5.3.5 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (IKK 5.3.5)

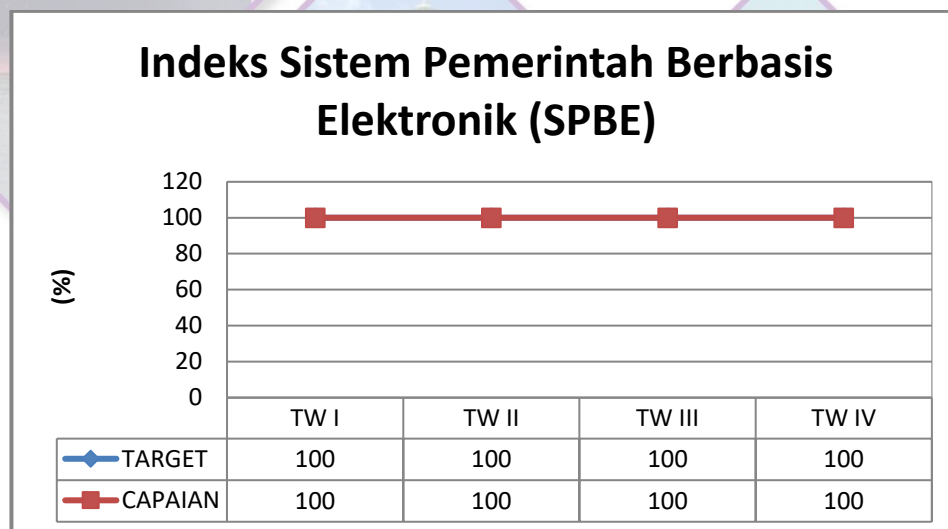
Tabel III.3.92 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.3.5	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 3,8 indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga prosentase terhadap target 100%

Grafik III.3.28 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (IKK 5.3.5)

Adapun realisasi Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.93 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (IKK5.3.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kegiatan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (IKK 5.3.5)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan



Tabel III.3.94 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (IKK 5.3.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber Data :

SASARAN KEGIATAN 5.4

Sasaran Kegiatan **Terlaksananya Pengelolaan Legislasi Dan Litigasi Transportasi Laut** terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut

5.4.1 Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum (IKK 5.4.1)

Tabel III.3.95 Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.4.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk persentase Layanan Hukum sebesar 100% untuk 13 kegiatan. Pada Triwulan I terdapat realisasi rencana pelaksanaan sebanyak 8 (delapan) kegiatan, pada Triwulan II terdapat realisasi rencana pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan, pada Triwulan III terdapat realisasi rencana pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan, pada Triwulan IV terdapat realisasi rencana pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dari target kegiatan sejumlah 12 (dua belas) dengan persentase pencapaian terhadap



target sebesar 92.9%, tidak terlaksananya 4 (empat) kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dengan realisasi rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Legalitas Perizinan Berusaha di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yakni
 - a. Verifikasi dan evaluasi pembahasan Bersama dalam rangka penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian 24 jam secara terus menerus dalam 1 (satu) hari pada terminal khusus bulan Mei 2025;
 - b. Verifikasi dan evaluasi lapangan Terminal Khusus PT Ang and Fang Brother untuk melayani Kepentingan Umum Sementara bulan Agustus 2025.
2. Monitoring Dan Evaluasi Penyiapan Rancangan Perumusan Kebijakan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagai berikut :
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Penyerahan Surat Keputusan Berusaha Pengoperasian Pelabuhan /Terminal Multi Purpose PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) di Yogyakarta bulan Maret 2025 .
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait usulan/masukan PT.Pelindo Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Pelayaran bulan Juni 2025.
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka verifikasi lapangan Sarana Bantu Pemanduan Kapal BUP PT. Indonesia Towage Servis pada Perairan Wajib pandu Kelas I di Perairan Pelabuhan Palembang bulan September 2025.
 - Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Permohonan Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus PLTU Tanjung Jati B pada Bulan November 2025.
 - Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pembahasan Evaluasi Lanjutan Kerjasama Administrasi dan Teknis Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Wilayah Kerja Kantor UPP Kelas II Tarempa pada Bulan Desember 2025.
3. Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan Rancangan Keputusan Dirjen (RKD), sebagai berikut :



- Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran pada Bulan Maret 2025;
 - Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Pemerintah bidang Pelayaran amanat Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 pada bulan Juni 2025;
 - Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kelaiklautan Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) pada tanggal November 2025 yang bertempat di Grand Orchardz Hotel Kemayoran, Jakarta.
 - Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut melalui Portal Layanan dan Data (PLD) Terintegrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember secara Virtual.
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut di Lingkungan Ditjen Hubla, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat efisiensi anggaran.
 5. Penataan legalitas aset lahan UPT di Lingkungan Ditjen Hubla, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran;
 6. Bimbingan Teknis Advokasi Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran;
 7. Koordinasi dengan Instansi Lain di Bidang Hukum dan Pelayaran;
 - a. Melaksanakan Peninjauan Lokasi Tim Terpadu untuk Proses Perizinan Membangun SKBL 20 kV Cilacap – Nusakambangan pada bulan Januari 2025;
 - b. Melaksanakan Peninjauan Lokasi Pembangunan Pipa Sea Water Intake di Perairan Dusun Sampar Goal 1 di Desa Emang Lestari, Kabupaten Sumbawa pada bulan Februari 2025;
 - c. Melaksanakan Peninjauan Lokasi Usaha Pengerukan dan Reklamasi atas nama PT Global Dredging Abadi (Perseroan), pada bulan Maret 2025;
 - d. Peninjauan lokasi tim terpadu dirjen hubla terkait rencana pengeluaran sistem komunikasi kabel laut APRICOT milik PT NTT Indonesia di Tanjung Pakis, Karawang pada tanggal 22 April 2025;
 - e. Permohonan dan undangan pemeriksaan bersama rekomendasi clearance tinggi jembatan pada tanggal 15 Mei 2025;
 - f. Verifikasi lapangan dan rapat teknis rencana pembangunan anjungan modifikasi anjungan dan instalasi pipa penyalur bawah laut baru pada proyek Manpatu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) tanggal 24 Juni 2025;
 - g. Melaksanakan peninjauan lapangan tim teknis terpadu ke lokasi PLTU Celukan Bawang (rabu-jumat 9-11 juli 2025)-PLTU Celukan Bawang;



- h. Menghadiri rapat koordinasi untuk konfirmasi data teknis rencana pembangunan 3 (tiga) jalur pipa penyalur bawah laut baru di area KKKS PT ONWJ pada tanggal 27 Agustus 2025 bertempat di RR Hotel Aryaduta Menteng;
- i. Melaksanakan peninjauan lokasi dan penandatanganan berita acara oleh tim teknis terpadu ditjen hubla proyek pembangunan pipa gas ruas WNTS-Pemping Kep Riau (10 September)-Pulau Pemping, Kep Riau;
- j. pembahasan formulasi dan mekanisme penerapan tarif PT Biro Klasifikasi Indonesia (persero) pada tanggal 22 Oktober 2025;
- k. Melaksanakan pembahasan penyusunan draft perjanjian kerjasama (PKS) dibidang Maritim dengan Komdigi pada tanggal 3 November 2025;
- l. Melaksanakan pembahasan konsep perjanjian kerja sama antara Ditjen Hubla dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI pada tanggal 1 Desember 2025.
8. Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran;
9. Perjalanan Dinas Terkait Penyusunan Ratifikasi Konvensi Internasional / Perjanjian Internasional Bidang Pelayaran, yakni terselenggaranya kegiatan Permohonan pembahasan ulang usulan keanggotaan pada international organization for marine aids to navigation (IOMAN) pada bulan Juni 2025.
10. Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM);
 - Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional pada bulan Maret 2025.
 - Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pada bulan Juli 2025.
 - Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Penyediaan dan/atau Pelayanan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan pada bulan November 2025.
11. Penyusunan / Pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen;
 - Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 327 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Kopmponen Kapal Tahun 2025 bulan Maret 2025.
 - Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 253 Tahun 2025 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pandu Indonesia Tahun 2025 bulan Juni 2025.



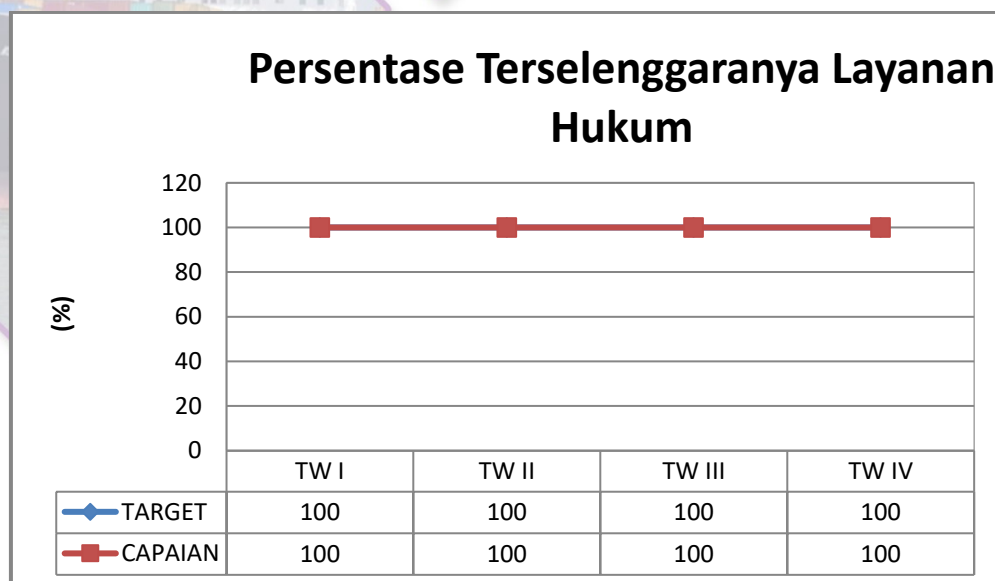
- Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 258 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendamping Aplikasi MaritimHub Ditjen Hubla pada bulan September 2025;
- Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 41 Tahun 2025 tentang Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemanduan dan Penundaan Kapal.

12. Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada bulan Juli 2025;

13. Legal Audit Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008;

- Legal audit pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan pada bulan Mei 2025; dan
- Legal audit pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran pada bulan Juni 2025.

Grafik III.3.28 Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum (IKK 5.4.1)

Adapun realisasi kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.



**Tabel III.3.96 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020
Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase
Terselenggaranya Layanan Hukum (IKK 5.4.1)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum (IKK 5.4.1)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum dengan target sebesar sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%

Tabel III.3.97 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum (IKK 5.4.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data



5.4.2 Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan (IKK 5.4.2)

Tabel III.3.98 Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.4.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan	%	100	100	100	100	92.9	92.9	92.9

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk persentase Layanan Kerjasama dan Kemitraan sebesar 100% untuk 14 kegiatan. Pada Triwulan I terdapat realisasi rencana pelaksanaan 13 (tiga belas) kegiatan, pada Triwulan II terdapat realisasi rencana pelaksanaan 16 (enam belas) kegiatan, pada Triwulan III terdapat realisasi 18 rencana pelaksanaan (delapan belas) kegiatan, pada Triwulan IV terdapat realisasi 18 (tujuh belas) kegiatan dari target kegiatan sejumlah 19 (sembilan belas) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 92.9%, tidak terlaksananya 1 (satu) kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dengan realisasi rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - a. Melakukan pembahasan terkait dengan perpanjangan perjanjian kerjasama antar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tanggal 11 September bertempat di Kantor PT BKI;
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap Perjanjian Konsesi antara KSOP Dumai PT Pelabuhan Mundam Sejahtera tanggal 31 Oktober 2025;
 - c. Melakukan Pembahasan Terkait Proses Pengurusan Penerbitan Hak atas Tanah (HPL dan HGB) Pada Area Konsesi Penyelenggaraan program kerjasama Teknis Selatan-Selatan pada tanggal 5 November 2025.
2. Penyelenggaraan program kerjasama Teknis Selatan-Selatan
Training on trainer (T.O.T) IMO Model Course 6.09 dan Trainer of Examiner (T.O.E) IMO Model course 3.12 bagi negara-negara anggota Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA) pada bulan Oktober 2025



3. Penyusunan naskah perjanjian kerja sama konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), sebagai berikut:
- Pembahasan Progres Perjanjian Konsesi dan Rencana Pengembangan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia Maspion Gresik pada bulan Januari 2025;
 - Pembahasan Reviu besaran biaya konsesi (*concession fee*) perusahaan jasa kepelabuhanan di terminal Sinar Centra Cipta di Pelabuhan Tanjung Emas pada bulan Februari 2025;
 - Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru – Batulicin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Dua Samudera Perkasa tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Setangga pada Pelabuhan Kota Baru Nomor : HK.201/01/09/KSOP.KBBL-2025 dan Nomor : 025/DSP-EXT/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;
 - Rapat Penilaian Konsep Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar dengan BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar pada tanggal 17 April 2025;
 - Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT Pelabuhan Buana Reja tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja di Pelabuhan Satui Nomor HK.201/1/1/KSOP.Satui-2025 dan Nomor 014/PBR-DIR/V/2025 tanggal 15 Mei 2025;
 - Pembahasan draft penyesuaian/novasi perjanjian konsesi perusahaan terminal Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan pada tanggal 29 Juni 2025;
 - Perjanjian Konsesi antara Kantor UPP Kelas I Sangkulirang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kementerian Perhubungan RI dengan PT Biru Arnawama Timur tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Di Perairan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor AL.301/34/5/UPP.SKG/2025 dan Nomor 88/PKS-WTDP/VII/DOK.25 pada tanggal 11 Juli 2025;
 - Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kementerian Perhubungan RI dengan PT Pelabuhan Talenta Bumi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Talenta Bumi di Pelabuhan Banjarmasin Nomor HK.201/01/20/KSPOP.BJM-2025 dan Nomor 001/ADN/PTB/VIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025;
 - Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas I Palembang dengan BUP PT Benua Laut Lepas tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2025.



- j. Pembahasan konsep addendum perjanjian konsesi PT Dua Samudera Perkasa pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di perairan Tanjung Pemancingan Prov Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Oktober 2025;
 - k. Pembahasan rancangan perjanjian konsesi perusahaan WTDP di Perairan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan pada tanggal 13 November 2025;
 - l. Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar dengan PT Pelabuhan Lembar Sejahtera tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar Nomor KU.204/01/01/KSOP.Lbr/2025 dan Nomor 004/MOU/PELTRA/Xii/2025 tanggal 4 Desember 2025.
4. Penyelenggaraan kerja sama teknis di Bidang Maritim;
- a. 11th Port Management Programme pada bulan juli 2025
 - b. Menyelenggarakan *Workshop on International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code* secara *hybrid* tanggal 20-21 Agustus 2025.
 - c. Menyelenggarakan *Port State Control (PSC) Mutual Inspection Training Course* secara *hybrid* pada tanggal 26-27 Agustus 2025.
 - d. Menyelenggarakan *Workshop on Vessel Inspection According to the International Bulk Chemical (IBC) Code* secara *hybrid* 16-17 September 2025.
 - e. Menyelenggarakan *Workshop on Vessel Inspection according to the International Maritime Solid Bulk Cargo (IMSBC) Code* secara *hybrid* pada tanggal 23 September 2025.
 - f. Menyelenggarakan *Workshop on Refresher Training Course for VTS Operator IALA V-103/5* secara *hybrid* tahun 2025 pada bulan Oktober 2025.
5. Penyusunan naskah perjanjian kerja sama dengan instansi terkait, sebagai berikut :
- a. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Pelayaran Nomor : HK.201/2/23/DJPL/2025 dan Nomor : PJ.01/12/2/3/DGKP/UTMA/PLND-25 tanggal 12 Februari 2025;
 - b. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) bulan Maret 2025;
 - c. Evaluasi dan Rencana Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal dengan Kejaksaan Agung bulan April 2025;
 - d. Pembahasan draft perjanjian kerja sama direktorat perkapalan dan kepelayatan dan dinas perikanan kabupaten jepara tanggal 22 Mei 2025;
 - e. Audiensi dan pembahasan perjanjian kerja sama antara ditjen hubla dengan gerakan ingat selamat layar indonesia tentang penyelenggaraann dukungan penelitian dan pengembangan di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut tanggal 30 Juni 2026;



- f. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Jepara pada bulan Juli 2025;
 - g. Amandemen Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2025 (Penugasan PT PELNI (Persero)) pada bulan Agustus 2025;
 - h. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran di Pelabuhan Patimban pada bulan September 2025;
 - i. Pembahasan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Perhubungan tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang transportasi dan sosial pada tanggal 1 Oktober 2025;
 - j. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal infrastruktur Digital dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Sinergitas Interkoneksi Sistem Layanan Perizinan di Bidang Maritim Nomor 06/DJID.4/SP.02.04/12/2025 dan HK.201/12/8/DJPL/2025 tanggal 18 Desember 2025.
6. Penyusunan naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan BMN di Lingkungan Ditjen Hubla, sebagai berikut:
- a. Pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Kantor KSOP Kelas II Benoa dengan PT. Easybook pada bulan Februari 2025;
 - b. Perjanjian antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Sewa Barang Milik Negara (BMN) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon berupa Bangunan Dermaga di Pelabuhan Ambon Nomor PL.001/1/1/KSOP-AMB.2025 dan Nomor PP.01/3/3/2/B2.2/GM/AMBN-25 tanggal 27 Maret 2025;
 - c. pembahasan tindak lanjut rencana kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN pada kantor UPP Kelas II Tual tanggal 8 Mei 2025;
 - d. Perjanjian Hibah Masuk Antara Pemerintah Kab Sinjai Prov Sulsel Dengan Ditjen Hubla RI Tentang Hibah BMD Berupa Tanah Milik Pemerintah Kab Sinjai Kepada Ditjen Hubla pada Bulan Juli 2025;
 - e. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI dengan PT Transporindo Nusantara Terminal tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unir Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub RI pada bulan September 2025;
 - f. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi dengan PT Pelabuhan Lembar Sejahtera tentang Kerja Sama Pemanfaatan



Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi pada Bulan November 2025.

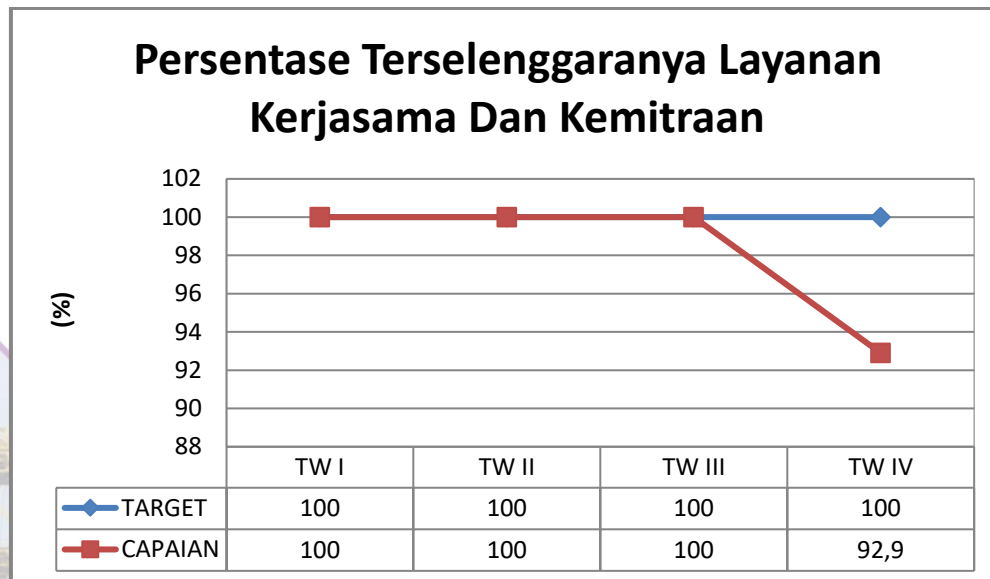
7. Menghadiri sidang internasional, regional, dan bilateral, sebagai berikut:
 - a. Menghadiri Sidang IMO *Legal Committee* (LEG) secara *hybrid* pada tanggal 24-28 Maret 2025, London, Inggris
 - b. Menghadiri Sidang IMO *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) ke-83 secara *hybrid* pada tanggal 7 – 11 April 2025, London, Inggris.
 - c. Menghadiri Sidang IMO *Council* ke-134 pada tanggal 7 – 11 Juli 2025, London, Inggris.
 - d. Menghadiri Sidang *Marine Environment Protection Committee* (MEPC/ES.2) – *2nd extraordinary session* pada tanggal 14-17 Oktober 2025, London, Inggris.
 - e. Menghadiri Rangkaian Sidang Dewan IMO ke-135, Majelis IMO ke-34, dan Dewan IMO ke-136, 19 November s.d. 4 Desember 2025, London, Inggris.
8. Penyusunan bahan kerja sama luar negeri dan pertemuan sidang internasional di Indonesia;
 - a. Penyiapan bahan pada pertemuan dengan *French Embassy* di Jakarta yang membahas isu terkait *Global Port Safety Project*;
 - b. Membantu Penyiapan bahan *Courtesy Meeting on UK-Indonesia Sustainable Infrastructure Partnership and UK Partnering for Accelerated Climate Transition* di Jakarta;
 - c. Penyiapan bahan pada pertemuan *Indonesia-Australia Marine Environment Coordination and Planning Meeting* (MECPM) ke-7 pada tanggal 29 April 2025 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta;
 - d. Penyiapan bahan pada pertemuan dengan delegasi Rusia tanggal 15 April 2025 di OP Room Kementerian Perhubungan;
 - e. Membantu penyiapan penyelenggaraan *the 1st Indonesia Maritime Week* (IMW) tahun 2025 tanggal 26-28 Mei 2025 di Jakarta.
 - f. Membantu penyiapan bahan *Courtesy Call* dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia kepada Menteri Perhubungan tanggal 20 Agustus 2025 di Wisma Tamu, Jakarta.
 - g. Membantu penyiapan bahan pada Pertemuan *the 3rd Indonesia - the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Working Group on Transportation* tanggal 15-16 September 2025 di Jakarta.
 - h. Membantu penyelenggaraan *the Joint Seminar Indonesia Bangladesh: Ship Recycling under the Hong Kong Convention* tanggal 16 s.d. 18 September 2025 di Jakarta.
 - i. ASEAN DEFA ke-14, kegiatan training on trainer (T.O.T) IMO Model Course 6.09 dan Trainer of Examiner (T.O.E) IMO Model Course 3.12 bagi negara-negara anggota Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA), 6 Oktober – 2 November 2025, Jakarta.



- j. Perundingan Joint Initiative on Services domestic Regulation (J-SDR) di VTO tanggal 20 November 2025
- k. 60th ASEAN Senior transport Officials Meeting (STOM) and Associated Meetings dan the 31st ASEAN Transport Ministers (ATM) and Associated Meetings 17 s.d. 20 November pleno IUNCF Jakarta 21 November 2025
9. Pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan IMO periode 2026-2027;
 - a. Melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri guna membahas strategi pemenangan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2026-2027 pada bulan Agustus 2025;
 - b. Persiapan Penyelenggaraan Resepsi Diplomatik RI di Jakarta dan di London pada tanggal 23 Oktober 2025;
 - c. Menyenggarakan Resepsi Diplomatik RI di London, 25 November 2025.
10. Penyelenggaraan workshop penyusunan bahan sidang luar negeri;
 - a. Menyenggarakan *Workshop* Penyusunan Bahan Sidang IMO *Legal Committee* (LEG) secara *hybrid* pada tanggal 24-28 Maret 2025, London, Inggris;
 - b. Menyenggarakan *Workshop* Penyusunan Bahan Sidang IMO *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) ke-83 secara *hybrid* pada bulan Mei 2025;
 - c. Menyenggarakan *Workshop* Penyusunan Bahan Sidang IMO *Council* ke-134 pada tanggal 7 – 11 Juli 2025, London, Inggris;
 - d. Menyenggarakan workshop penyusunan bahan Sidang Dewan IMO ke-135, Majelis IMO ke-34, dan Dewan IMO ke-136, 19 November s.d. 4 Desember 2025, London, Inggris.
11. Pemenuhan kontribusi tahunan pada organisasi internasional;
 - a. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembayaran kontribusi tahunan Indonesia pada organisasi *International Organization for Marine Aids to Navigation* (IALA) pada bulan Januari 2025;
 - b. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembayaran kontribusi tahunan Indonesia pada Tokyo MoU pada bulan Mei 2025;
12. Penyelenggaraan pertemuan IMO GLO-FOULING Project;
 - Menyenggarakan pertemuan *3rd Global Project Task Force Meeting of the Glofouling Partnership Project* (GPTF), 10 s.d. 12 Maret 2025 di Bali.
13. Penyelenggaraan pertemuan bilateral bidang maritim (pada tahun 2025 tidak dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran);
14. Pelaksanaan IMSAS

Pelaksanaan *IMO Member State Audit Scheme* (IMSAS) pada tanggal 16 s.d 23 Juni 2025 di Kantor Kementerian Perhubungan.

Grafik III.3.29 Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan (IKK 5.4.2)

Adapun realisasi kinerja Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.99 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan (IKK 5.4.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	92.9
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	92.9

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan (IKK 5.4.2)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan dengan target sebesar sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100

Tabel III.3.100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan (IKK 5.4.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan	%	Target	100
		Realisasi	92.9
		Kinerja (%)	92.9

Sumber Data : Sub Bidang Advokasi dan Perjanjian Internasional, Bagian Hukum dan Kerja Sama

5.4.3 Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati (IKK 5.4.3)

Tabel III.3.101 Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.4.3	Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional, Bagian Hukum dan KSLN

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati sebesar 100% dan capaian Triwulan I dan Triwulan II terhadap target



sebesar 100%. Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 5.4.3) terdapat 1 (satu) Kegiatan dengan 12 rencana pelaksanaan, yaitu Penyusunan Bahan Perjanjian Internasional yang disepakati. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun *Instrument of Extension for the Memorandum of Understanding (MoU) Training DGST-MPA* pada bulan Januari 2025;
2. Menyampaikan tanggapan akhir terhadap Draf MoU antara Indonesia dengan Belanda mengenai saling pengakuan sertifikat pelaut pada bulan Februari 2025;
3. Menyusun Draf Memorandum of Cooperation (MoC) antara Indonesia dengan *International Maritime Organization (IMO)* mengenai Partisipasi *IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)* pada bulan Maret 2025.
4. Penandatanganan *Memorandum of Cooperation (MoC)* antara Indonesia dengan *International Maritime Organization (IMO)* mengenai Partisipasi *IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)* pada bulan April 2025.
5. Penandatanganan MoU antara Kementerian Perhubungan dan *Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherland* terkait Pengakuan Sertifikat Pelaut pada bulan mei 2025.
6. Melakukan komunikasi dengan Brunei Darussalam terkait rencana penandatanganan MoU pada bulan Juni 2025.
7. Memberikan tanggapan dan masukan terhadap *MoU on Cooperation in the Field of Transport* antara RI dan Malaysia pada bulan Juli 2025.
8. Penukaran MoU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Maritime and port Authority of Brunei Darussalam *concerning in the Field of Mercant Shipping and Port Operation* pada bulan Agustus 2025.
9. Memberikan tanggapan terhadap usulan MoU antara Dewan Maritim Federasi Rusia dan Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia pada bulan September 2025.
10. Pembahasan catatan/correctiv action plan terkait hasil technical mission, pembahasan rencana perpanjangan MoU dengan IALA pada bulan Oktober 2025
11. Pembahasan Dokumen initial Memorandum Bidang Biotechnology Development and Chemical Utilization pada LI Nomor : 0502, 0446, 0230, 01111 dan 0285 pada bulan November 2025
12. Penandatanganan MoU antara DJPL dan IALA terkait Kerja Sama Bidang Keselamatan Maritim pada bulan desember 2025

Grafik III.3.31 Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati (IKK 5.4.3)

Adapun realisasi kinerja Persentase Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

**Tabel III.3.102 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020
Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perjanjian Kerja
Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati (IKK 5.4.3)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :



c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati (IKK 5.4.3)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati dengan target sebesar sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100

Tabel III.3.103 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati (IKK 5.4.3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.4.4 Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut

a.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut (IKK 5.4.4)



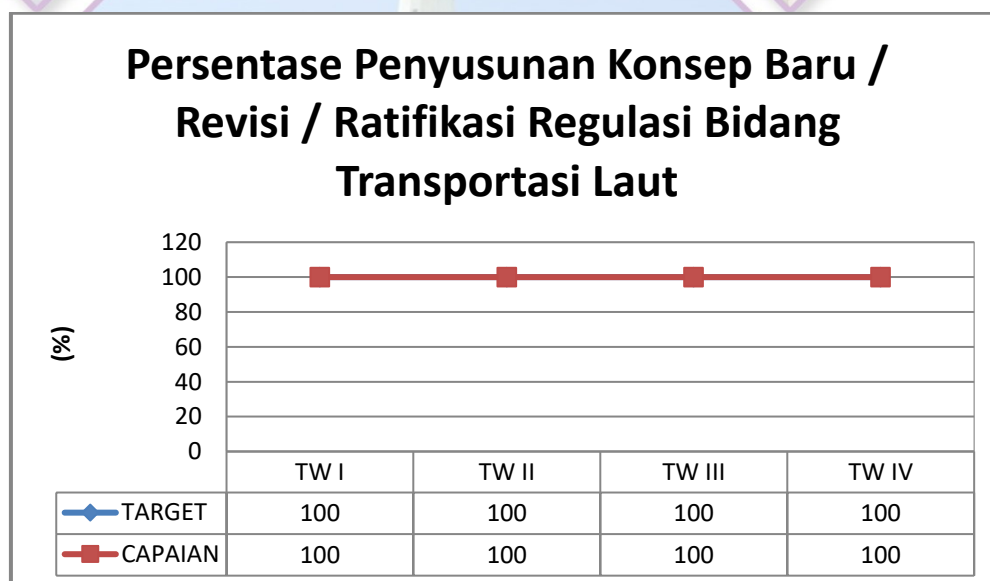
Tabel III.3.104 Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK. 5.4.4	Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data :

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut sebesar 100% dari target 1 rencana pelaksanaan. Pada Triwulan II terealisasi sebesar 1 pelaksanaan yaitu Penyusunan Ratifikasi Konvensi Internasional / Perjanjian Internasional Bidang Pelayaran terkait terselenggaranya kegiatan Permohonan pembahasan ulang usulan keanggotaan pada *international organization for marine aids to navigation* (IOMAN), sehingga persentase pencapaian target sebesar 100%

Grafik III.3.32 Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut





b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut (IKK 5.4.4)

Adapun realisasi kinerja Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.105 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut (IKK 5.4.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut	Jumlah	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data :

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut (IKK 5.4.4)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut dengan target sebesar sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100



Tabel III.3.106 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut (IKK 5.4.4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data

5.4.5 Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional

a.) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional (IKK 5.4.5)

Tabel III.3.107 Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5.4.5	Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional, Bagian Hukum dan KSLN

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk Persentase Keterlibatan Kesekretariatan DJPL Dalam Kerjasama Internasional sebesar 100% dan capaian Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terhadap target sebesar 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



1. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Sub-Committee on Pollution Prevention and Response* (PPR) ke-12, 27-31 Januari 2025, London, Inggris;
2. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping* (HTW) ke-11, 10-14 Februari 2025 London, Inggris;
3. Menyusun bahan Sidang *IMO Legal Committee* (LEG), 24-28 Maret 2025, London, Inggris.
4. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Marine Environment Protection Committee* (MEPC) ke-83 secara *hybrid* pada tanggal 7 – 11 April 2025, London, Inggris;
5. Membantu penyusunan bahan Sidang *Technical Cooperation Committee* (TC) ke-75 secara *hybrid* pada tanggal 2 – 6 Juni 2025, London, Inggris;
6. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Maritime Safety Committee* (MSC) ke-110 secara *hybrid* pada tanggal 18 - 27 Juni 2025, London, Inggris.
7. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Council* ke-134 secara *hybrid* pada tanggal 7 – 11 Juli 2025, London, Inggris.
8. Membantu penyusunan bahan Sidang *Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments* (III) ke-11 secara *hybrid* pada tanggal 21 - 25 Juli 2025, London, Inggris.
9. Membantu penyusunan bahan Sidang *Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers* (CCC) ke-11 secara *hybrid* pada tanggal 8 – 12 September 2025, London, Inggris.
10. Membantu penyusunan bahan Sidang *Marine Environment Protection Committee* (MEPC/ES.2) – 2nd extraordinary session, secara *hybrid* pada tanggal 14-17 Oktober 2025, London, Inggris.
11. Membantu penyusunan bahan Sidang *Council* secara *hybrid* pada tanggal 19 – 21 November 2025, London, Inggris.
12. Membantu penyusunan bahan Sidang *Assembly dan Council* 136 secara *hybrid* pada tanggal 24 November – 4 Desember 2025



Grafik III.3.32 Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional



b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional (IKK 5.4.5)

Adapun realisasi kinerja Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional Yang Disepakati pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.3.108 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional (IKK 5.4.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRITERIA		TAHUN					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan	Jumlah	Target		-	-	-	-	-	100
		Realisasi		-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)		-	-	-	-	-	100



Laut Dalam Kerjasama Internasional									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data :

c)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional (IKK 5.4.5)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional dengan target sebesar sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100

Tabel III.3.109 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional (IKK 5.4.5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data



c) ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Tabel III.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
SK 2.4	Meningkatnya Dukungan Penunjang Teknis Terhadap Pelayanan Transportasi Laut	IKK 2.4.1	Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	100	100				
		IKK 2.4.2	Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	100	100				
		IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	96,40	93,82				
SK 4	Meningkatnya Dukungan Teknis Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Yang Baik	IKK 4.1	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	%	100	100				
		IKK 4.2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja	%	100	100				
		IKK 4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan Nspk	%	100	100				



		IKK 4.4	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung	%	100	100				
		IKK 4.5	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	100				
		IKK 4.6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indeks	94	94,95				
		IKK 4.7	Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal	%	100	100				
		IKK 4.8	Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	Kegiatan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Ditjen Hubla	Pagu Awal 1.089.115.000 Pagu Akhir 866.401.000	845.759.830	
		IKK 4.10	Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL	%	100	100				
SK 5.1	Terlaksananya pengelolaan organisasi dan	IKK 5.1.1	Persentase Terselenggaranya	%	100	100				



	SDM transportasi laut		Layanan Manajemen SDM							
		IKK 5.1.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	%	100	100				
		IKK 5.1.3	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	%	100	100				
		IKK 5.1.4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100				
		IKK 5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Indeks	79,5	82.85				
SK 5.2	Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut	IKK 5.2.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Perencanaan	%	100	100				
		IKK 5.2.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Anggaran	%	100	100				
		IKK 5.2.3	Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	%	100	100				



		IKK 5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	Nilai	80	82,79				
		IKK 5.2.5	Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran	%	100	100				
		IKK 5.2.6	Persentase Terselenggaranya Layanan Umum	%	100	100				
		IKK 5.2.7	Persentase Usulan Pemanfaatan Bmn Yang Ditindaklanjuti	%	100	100				
		IKK 5.2.8	Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan	%	100	100				
		IKK 5.2.9	Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (Psp Bmn) Yang Ditindaklanjuti	%	100	100				
SK 5.3	Terlaksananya pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi laut	IKK 5.3.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan	%	100	131				
		IKK 5.3.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi	%	100	100				



		IKK 5.3.3	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Nilai	3,8	4.0				
		IKK 5.3.4	Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial	%	100	103				
		IKK 5.3.5	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,8	100				
SK 5.4	Terlaksananya pengelolaan legislasi dan litigasi transportasi laut	IKK 5.4.1	Persentase Terselenggaranya Layanan Hukum	%	100	100		Pagu Awal 8.328.574.000 Pagu Akhir 936.119.000	921.079.717	1.61%
		IKK 5.4.2	Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan	%	100	92.9		Pagu Awal 36.658.662.000 Pagu Akhir 8.135.034.000	8.082.776.900	0,65%
		IKK 5.4.3	Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati	%	100	100				



		IKK 5.4.4	Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut	%	100	100	kegiatan Permohonan pembahasan ulang usulan keanggotaan pada <i>international organization for marine aids to navigation</i> (IOMAN)	0	0	0
		IKK 5.4.5	Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional	%	100	100				





d) **REALISASI ANGGARAN**

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2025 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.5.1 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025**

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Belanja Pegawai	110.370.536.000	131,134,711,000	130,064,822,768
2	Belanja Barang	302.829.861.000	112,834,947,000	112,363,230,245
3	Belanja Modal	11.252.809.000	24,537,000,000	24,418,175,758
	TOTAL PAGU	424.453.206.000	268,506,658,000	
	TOTAL REALISASI			266,846,228,771
	TOTAL SISA DANA			1,660,429,229

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 15 Januari 2026))



Tabel III.5.2 Realisasi Belanja Per Program

NO	Kode		Pagu Awal	Pagu Revisi	Real	%	Sisa
1.	022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	135.759.804.000	82.119.588.000	81.748.728.983	99.55	370.859.017
2.	022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	288.693.402.000	186.387.070.000	185.368.676.205	99.45	1.018.393.795
TOTAL			424.453.206.000	268.506.658.000	267.117.405.188	99.48	1.379.252.812

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut





BAB IV

PENUTUP

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025

III.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditrektorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 Tingkat Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.4.1 Tingkat Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%, terdapat 3 kegiatan yaitu : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan serta Software Pengolah Data Survei, Maritime Hub (Satu portal layanan data) dan Pembangunan Sistem Informasi Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok (SIRIP). Adapun pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III terdapat realisasi 100% pada Kecukupan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga prosentase terhadap target 100%.

2.4.2 Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I, sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% pada Tingkat Keandalan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga prosentase terhadap target 100%.

2.4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi dan Triwulan II realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai target sebesar 94,56%, sehingga pencapaian kinerja sebesar 115,32%.

Terlihat pada Triwulan III dan Triwulan IV realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai indeks 93,82 terjadi penurunan pada Triwulan II ke Triwulan III dikarenakan ada responden yang menilai ketidakpuasan terhadap Waktu Penyelesaian dan Respon Petugas sehingga belum memenuhi target kinerja tahun 2025, dan pada Triwulan IV di bulan Desember terdapat perubahan Target Indikator dari yang sebelumnya 82 indeks menjadi 96,40%



4.1 Persentase SDM DJPL yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM yang di Selenggarakan oleh DJPL dan BPPTL

Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Yang Baik merupakan ukuran kinerja untuk berbagai kegiatan dukungan teknis berupa kegiatan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian, serta Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan dan keamanan pelayaran adapun tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diukur dengan membandingkan antara realisasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dukungan teknis (Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan) di setiap bidang transportasi laut.

4.2 Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III terdapat realisasi 100% pada Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sehingga prosentase terhadap target 100%.

4.3 Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Kepatuhan Pelaporan Kinerja, sehingga prosentase terhadap target 100%.

4.4 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung.

Untuk Tahun 2025 target dari Persentase Pencapaian PNBPN sebesar 100. Terlihat pada Triwulan I. Sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi kinerja adalah 100, hal ini menunjukkan bahwa target PNBPN tercapai dengan baik.

4.5 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun anggaran 2025 sebesar 94% yang merupakan hasil perhitungan indikator pelaksanaan anggaran berdasarkan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil



pelaksanaan anggaran. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II terdapat realisasi IKPA sebesar 99.56% dan 96.17%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Maret 2025, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 102.31% dan Triwulan III terdapat realisasi IKPA sebesar 94,95%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 1 Oktober 2025, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 101,01%

4.6 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (KPA) tahun anggaran 2025 sebesar 94% yang merupakan hasil perhitungan indikator pelaksanaan anggaran berdasarkan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III terdapat persentase KPA sebesar 99,57% dan 96.27%, dan 94.99% yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sedangkan Triwulan IV terdapat persentase KPA sebesar 94.45%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 5 Januari 2026, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 100.48%

4.7 Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal

Untuk Tahun 2025 target dari Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal sebesar 100 Terlihat pada Triwulan I. Sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi kinerja adalah 100, hal ini menunjukkan bahwa target Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal tercapai dengan baik.

4.8 Persentase Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk persentase Layanan Bantuan Hukum sebesar 100% untuk 12 kegiatan. Pada Triwulan I terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, pada Triwulan II terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, pada Triwulan III terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, pada Triwulan IV terdapat realisasi 3 (tiga) kegiatan dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 100% sehingga total kegiatan sampai dengan triwulan IV sejumlah 12 (dua belas) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



1. Menghadiri Sidang Perkara Tata Usaha Negara Padang Nomor 21/G/2024/PTUN.PDG dengan agenda Pemeriksaan Saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V atas Gugatan Koperasi TKBM Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang bulan Januari 2025;
2. Menyusun kesimpulan Perkara Tata Usaha Negara Padang Nomor 21/G/2024/PTUN.PDG atas Gugatan Koperasi TKBM Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang bulan Februari 2025;
3. Menyiapkan daftar bukti Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2024/PN.Trg untuk Gugatan Class Action antara Bacotang, dkk selaku Para Penggugat melawan PT. Bintang Kartika Segara, dkk selaku Para Tergugat, dan dalam hal ini Menteri Perhubungan sebagai Tergugat XXVI dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda sebagai Tergugat XXVI bulan Maret 2025;
4. Melakukan Pembahasan Penyusunan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Perkara TUN Nomor 3/G/2025/PTUN.GTO pada tanggal 28 s.d. 30 April 2025;
5. Melakukan Pembahasan Penyusunan Daftar Bukti Tergugat II Intervensi dalam Perkara TUN Nomor 3/G/2025/PTUN.GTO pada tanggal 26 s.d. 28 Mei 2025;
6. Menghadiri Sidang Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 3/G/2025/PTUN.GTO dengan Agenda Pemeriksaan Setempat dan Saksi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 s.d. 5 Juni 2025;
7. Menghadiri Sidang Perkara Perdata Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN.Trg dengan agenda pembacaan gugatan pada tanggal 31 Juli 2025;
8. Menghadiri Sidang Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.G/2025/PN.Sos dengan agenda mediasi pada tanggal 11 Agustus 2025;
9. Melakukan Pendampingan Hukum di Ditpolairud Polda Jatim terhadap ASN Kementerian Perhubungan atas nama Frandy Irawan, SH, terkait dengan Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada tanggal 15 s.d. 17 September 2025;
10. Melakukan Penyusunan Daftar Bukti Tambahan Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Sos pada tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2025;
11. Melakukan Pembahasan Penyusunan Kesimpulan Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Sos pada tanggal 18 November 2025;
12. Melakukan Pendampingan kepada Sdr. Baitul Makmur (selaku Plt. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan) dan Sdr. Raden Ismail (selaku mantan Pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan) terkait Penyelidikan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Melakukan Penutuhan Kapal Dengan Tidak Memenuhi Persyaratan Perlindungan Lingkungan Maritim pada tanggal 29 s.d. 30 Desember 2025



4.10 Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL

Untuk Tahun 2025 target dari Persentase Persentase Penyelenggaraan Layanan Internal sebesar 100 Terlihat pada Triwulan I Sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi kinerja adalah 100, hal ini menunjukkan bahwa target Persentase SDM DJPL Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Yang Diselenggarakan Oleh DJPL Dan BPPTL tercapai dengan baik.

5.1.1 Persentase Layanan Manajemen SDM

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Pada tahun 2025, Bagian Sumber Daya Manusia telah melaksanakan mutasi Pejabat Struktural pada tanggal 9 Mei 2025 sebanyak 235 pegawai yang terdiri dari pejabat Eselon I, II, III dan IV. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan pra assessment test sebanyak dua (2) batch dengan total peserta 149 orang dan assessment test sebanyak empat (4) batch dengan total peserta 46 orang. Selanjutnya usulan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan fungsional umum yang telah diproses sebanyak 608 dokumen usulan dan penerbitan SK jabatan pelaksana sebanyak 13.421. Selanjutnya pemindahan/mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 82 orang pada triwulan I, 75 orang pada triwulan II, 49 orang pada triwulan III dan 34 orang pada triwulan IV. Seluruh kegiatan tercapai dengan realisasi sebesar 100%.

5.1.2 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi SDM

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III terdapat realisasi 100% Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi SDM, sehingga prosentase terhadap target 100%.

5.1.3 Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi SDM

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%

5.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Adapun pemenuhan kebutuhan SDM DJPL sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan DJPL tahun 2025 dipenuhi dengan pelaksanaan perekrutan ASN yang formasinya telah ditetapkan sebanyak 4602 untuk PPPK, 817 formasi untuk CPNS umum, dan 983 formasi untuk CPNS jalur pola pembibitan (Polbit) sehingga total formasi yang didapatkan sebanyak 6402 formasi. Setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan, calon ASN yang berhasil direkrut dan diangkat berdasarkan SK pengangkatan sebanyak 3822 pegawai untuk PPPK Tahap I dan CPNS umum sebanyak 574 pegawai dimana SK pengangkatannya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni 2025, sehingga pemenuhan kebutuhan SDM yang berhasil direkrut sebanyak 4396 pegawai dan jumlah tersebut pada triwulan II setara dengan 68,6% dari target pemenuhan kebutuhan SDM.

Selanjutnya pada triwulan IV tahun 2025 terdapat pengangkatan PPPK Tahap II sebanyak 672 pegawai TMT 1 Oktober 2025, PPPK Paruh Waktu sebanyak 1646 pegawai TMT 1 Oktober 2025 serta CPNS Polbit sebanyak 983 pegawai TMT 1 Desember 2025 sehingga pemenuhan kebutuhan SDM di triwulan IV tahun 2025 sebanyak 3301 yang setara dengan 51,5% dari target pemenuhan kebutuhan SDM. Total realisasi pemenuhan kebutuhan SDM tahun 2025 sebanyak 7697 dengan persentase pemenuhan sebesar 120,1% dari target yang ditetapkan 100%.

5.1.5 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Umum, sehingga prosentase terhadap target 100%.

5.2.1 Persentase Layanan Perencanaan

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%.

5.2.2 Persentase Layanan Anggaran

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%.



5.2.3 Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Terselenggaranya Layanan Pemantauan Dan Evaluasi, sehingga prosentase terhadap target 100%

5.2.4 Nilai AKIP (Unit Kerja)

Pada Tahun 2025 target nilai AKIP Setditjen Hubla sebesar 80 nilai, Adapun pada Triwulan I dan Triwulan II realisasi Nilai AKIP Setditjen Hubla belum dilaksanakan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub, sehingga pencapaian kinerja sebesar 0%. Pada Triwulan III tepatnya di Bulan Agustus telah dilaksanakan Evaluasi dan Penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub. Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh nilai sebesar 82,79 sehingga prosentasi pencapaian kinerjanya sebesar 100,96. Nilai tersebut Pada Tahun 2025 target nilai AKIP Setditjen Hubla sebesar 80 nilai, Adapun pada Triwulan I dan Triwulan II realisasi Nilai AKIP Setditjen Hubla belum dilaksanakan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub, sehingga pencapaian kinerja sebesar 0%. Pada Triwulan III tepatnya di Bulan Agustus telah dilaksanakan Evaluasi dan Penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub. Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh nilai sebesar 82,79 sehingga prosentasi pencapaian kinerjanya sebesar 100,96%.

5.2.5 Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi 100% Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran, sehingga prosentase terhadap target 100%.

5.2.6 Persentase Terselenggaranya Layanan Umum

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi 100% Persentase Terselenggaranya Layanan Umum sehingga prosentase terhadap target 100%

5.2.7 Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Usulan Pemanfaatan BMN Yang Ditindaklanjuti, sehingga prosentase terhadap target 100



5.2.8 Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan

Adapun realisasi Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Yang Dilaksanakan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

5.2.9 Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) Yang Ditindaklanjuti, sehingga prosentase terhadap target 100%

5.3.1 Persentase Terselenggaranya Layanan Kehumasan

Pada tahun 2025 target Presentase Layanan Kehumasan sebesar 100 % dari 96 siaran pers dalam satu tahun. Siaran pers yang diterbitkan oleh Bagian Organisasi dan Humas merupakan pernyataan resmi yang disampaikan kepada jurnalis atau media dengan tujuan memberikan informasi capain kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun pada Triwulan I – IV telah menerbitkan sebanyak 126 siaran pers, yaitu Januari sebanyak 10 siaran pers, Februari sebanyak 4 siaran pers, Maret sebanyak 11 siaran pers, April sebanyak 6 siaran pers, Mei sebanyak 14 siaran pers, Juni sebanyak 12 siaran pers, Juli sebanyak 18 siaran pers, Agustus sebanyak 5 siaran pers, September sebanyak 12 siaran pers, Oktober sebanyak 5 siaran pers, November sebanyak 16 siaran pers dan Desember sebanyak 13 siaran pers 100%.

5.3.2 Persentase Terselenggaranya Layanan Data Dan Informasi

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%

5.3.3 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025 target Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik sebesar 3,8 Skala Likert dengan nilai maksimal 5 skala likert.



Adapun rentang nilai 1 sampai dengan 5 dengan kategori, yaitu nilai 1 adalah kategori sangat buruk, nilai 2 adalah kategori buruk, nilai 3 adalah kategori cukup, nilai 4 adalah kategori baik dan nilai 5 adalah kategori sangat baik.

Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum dengan cara memberikan kuesioner kepada 10 (sepuluh) orang responden yang telah melakukan permohonan informasi.

Berdasarkan tabel Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik, pada Triwulan I terlihat realisasi kinerja sebesar 4,3 Skala Likert, Triwulan II sebesar 4,1 Skala Likert, Triwulan III sebesar 3,9 Skala Likert dan Triwulan IV sebesar 4,0 Skala Likert.

5.3.4 Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial

Pada Tahun 2025 target Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial sebesar 100% dari 360 konten. Dalam mempublikasikan informasi terkait capaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut salah satunya dilakukan melalui kanal media sosial **@djplkemenhub151**.

Adapun pada Triwulan I - IV telah membuat sebanyak 371 konten yang telah diposting melalui Instagram, yaitu Januari sebanyak 31 konten, Februari sebanyak 26 konten, Maret sebanyak 33 konten, April sebanyak 30 konten, Mei sebanyak 29 konten, Juni sebanyak 28 konten, Juli sebanyak 33 konten, Agustus sebanyak 33 konten, September sebanyak 31 konten, Oktober sebanyak 30 konten, November sebanyak 31 konten dan Desember sebanyak 36 konten.

Berdasarkan tabel Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Sosial, pada Triwulan I terlihat realisasi kinerja sebesar 25%, Triwulan II sebesar 49,16%, Triwulan III sebesar 76,11% dan Triwulan IV sebesar 103%%

5.3.5 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 100% Persentase Layanan Internal, sehingga prosentase terhadap target 100%

5.4.1 Nilai AKIP Setditjen Hubla

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk persentase Layanan Hukum sebesar 100% untuk 13 kegiatan. Pada Triwulan I terdapat realisasi rencana pelaksanaan sebanyak 8 (delapan) kegiatan, pada Triwulan II terdapat realisasi rencana pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan, pada Triwulan III terdapat realisasi rencana pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan, pada Triwulan IV terdapat realisasi rencana pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dari target kegiatan sejumlah 12



(dua belas) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 92.9%, tidak terlaksananya 4 (empat) kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dengan realisasi rincian kegiatan sebagai berikut :

Legalitas Perizinan Berusaha di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yakni

- a. Verifikasi dan evaluasi pembahasan Bersama dalam rangka penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian 24 jam secara terus menerus dalam 1 (satu) hari pada terminal khusus bulan Mei 2025;
- b. Verifikasi dan evaluasi lapangan Terminal Khusus PT Ang and Fang Brother untuk melayani Kepentingan Umum Sementara bulan Agustus 2025.

2. Monitoring Dan Evaluasi Penyiapan Rancangan Perumusan Kebijakan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Penyerahan Surat Keputusan Berusaha Pengoperasian Pelabuhan /Terminal Multi Purpose PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) di Yogyakarta bulan Maret 2025 .
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait usulan/masukan PT.Pelindo Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Pelayaran bulan Juni 2025.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka verifikasi lapangan Sarana Bantu Pemanduan Kapal BUP PT. Indonesia Towage Servis pada Perairan Wajib pandu Kelas I di Perairan Pelabuhan Palembang bulan September 2025.
- Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Permohonan Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus PLTU Tanjung Jati B pada Bulan November 2025.
- Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pembahasan Evaluasi Lanjutan Kerjasama Administrasi dan Teknis Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Wilayah Kerja Kantor UPP Kelas II Tarempa pada Bulan Desember 2025.

3. Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan Rancangan Keputusan Dirjen (RKD), sebagai berikut :



- Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran pada Bulan Maret 2025;
 - Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Pemerintah bidang Pelayaran amanat Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 pada bulan Juni 2025;
 - Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kelaiklautan Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) pada tanggal November 2025 yang bertempat di Grand Orchardz Hotel Kemayoran, Jakarta.
 - Melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (Public Hearing) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut melalui Portal Layanan dan Data (PLD) Terintegrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember secara Virtual.
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut di Lingkungan Ditjen Hubla, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat efisiensi anggaran.
 5. Penataan legalitas aset lahan UPT di Lingkungan Ditjen Hubla, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran;
 6. Bimbingan Teknis Advokasi Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran;
 7. Koordinasi dengan Instansi Lain di Bidang Hukum dan Pelayaran;
 - a. Melaksanakan Peninjauan Lokasi Tim Terpadu untuk Proses Perizinan Membangun SKBL 20 kV Cilacap – Nusakambangan pada bulan Januari 2025;
 - b. Melaksanakan Peninjauan Lokasi Pembangunan Pipa Sea Water Intake di Perairan Dusun Sampar Goal 1 di Desa Emang Lestari, Kabupaten Sumbawa pada bulan Februari 2025;
 - c. Melaksanakan Peninjauan Lokasi Usaha Pengerukan dan Reklamasi atas nama PT Global Dredging Abadi (Perseroan), pada bulan Maret 2025;
 - d. Peninjauan lokasi tim terpadu dirjen hubla terkait rencana penggelaran sistem komunikasi kabel laut APRICOT milik PT NTT Indonesia di Tanjung Pakis, Karawang pada tanggal 22 April 2025;
 - e. Permohonan dan undangan pemeriksaan bersama rekomendasi clearance tinggi jembatan pada tanggal 15 Mei 2025;
 - f. Verifikasi lapangan dan rapat teknis rencana pembangunan anjungan modifikasi anjungan dan instalasi pipa penyalur bawah laut baru pada proyek Manpatu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) tanggal 24 Juni 2025;



- g. Melaksanakan peninjauan lapangan tim teknis terpadu ke lokasi PLTU Celukan Bawang (rabu-jumat 9-11 juli 2025)-PLTU Celukan Bawang;
 - h. Menghadiri rapat koordinasi untuk konfirmasi data teknis rencana pembangunan 3 (tiga) jalur pipa penyalur bawah laut baru di area KKKS PT ONWJ pada tanggal 27 Agustus 2025 bertempat di RR Hotel Aryaduta Menteng;
 - i. Melaksanakan peninjauan lokasi dan penandatanganan berita acara oleh tim teknis terpadu ditjen hubla proyek pembangunan pipa gas ruas WNTS-Pemping Kep Riau (10 September)-Pulau Pemping, Kep Riau;
 - j. pembahasan formulasi dan mekanisme penerapan tarif PT Biro Klasifikasi Indonesia (persero) pada tanggal 22 Oktober 2025;
 - k. Melaksanakan pembahasan penyusunan draft perjanjian kerjasama (PKS) dibidang Maritim dengan Komdigi pada tanggal 3 November 2025;
 - l. Melaksanakan pembahasan konsep perjanjian kerja sama antara Ditjen Hubla dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI pada tanggal 1 Desember 2025.
8. Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan, pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran;
9. Perjalanan Dinas Terkait Penyusunan Ratifikasi Konvensi Internasional / Perjanjian Internasional Bidang Pelayaran, yakni terselenggaranya kegiatan Permohonan pembahasan ulang usulan keanggotaan pada international organization for marine aids to navigation (IOMAN) pada bulan Juni 2025.
10. Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM);
- Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional pada bulan Maret 2025.
 - Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pada bulan Juli 2025.
 - Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Penyediaan dan/atau Pelayanan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan pada bulan November 2025.
11. Penyusunan / Pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen;
- Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 327 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal Tahun 2025 bulan Maret 2025.



- Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 253 Tahun 2025 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pandu Indonesia Tahun 2025 bulan Juni 2025.
 - Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 258 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendamping Aplikasi MaritimHub Ditjen Hubla pada bulan September 2025;
 - Penyusunan/Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 41 Tahun 2025 tentang Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemanduan dan Penundaan Kapal.
12. Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada bulan Juli 2025;
13. Legal Audit Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008;
- Legal audit pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan pada bulan Mei 2025; dan
 - Legal audit pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran pada bulan Juni 2025

5.4.2 Persentase Terselenggaranya Layanan Kerjasama Dan Kemitraan

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk persentase Layanan Kerjasama dan Kemitraan sebesar 100% untuk 14 kegiatan. Pada Triwulan I terdapat realisasi rencana pelaksanaan 13 (tiga belas) kegiatan, pada Triwulan II terdapat realisasi rencana pelaksanaan 16 (enam belas) kegiatan, pada Triwulan III terdapat realisasi 18 rencana pelaksanaan (delapan belas) kegiatan, pada Triwulan IV terdapat realisasi 18 (tujuh belas) kegiatan dari target kegiatan sejumlah 19 (sembilan belas) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 92.9%, tidak terlaksananya 1 (satu) kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dengan realisasi rincian kegiatan sebagai berikut.

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - a. Melakukan pembahasan terkait dengan perpanjangan perjanjian kerjasama antar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tanggal 11 September bertempat di Kantor PT BKI;



- b. Melakukan Evaluasi terhadap Perjanjian Konsesi antara KSOP Dumai PT Pelabuhan Mundam Sejahtera tanggal 31 Oktober 2025;
- c. Melakukan Pembahasan Terkait Proses Pengurusan Penerbitan Hak atas Tanah (HPL dan HGB) Pada Area Konsesi Penyelenggaraan program kerjasama Teknis Selatan-Selatan pada tanggal 5 November 2025.
2. Penyelenggaraan program kerjasama Teknis Selatan-Selatan
Training on trainer (T.O.T) IMO Model Course 6.09 dan Trainer of Examiner (T.O.E) IMO Model course 3.12 bagi negara-negara anggota Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA) pada bulan Oktober 2025
3. Penyusunan naskah perjanjian kerja sama konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), sebagai berikut:
 - a. Pembahasan Progres Perjanjian Konsesi dan Rencana Pengembangan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia Maspion Gresik pada bulan Januari 2025;
 - b. Pembahasan Reviu besaran biaya konsesi (*concession fee*) perusahaan jasa kepelabuhanan di terminal Sinar Centra Cipta di Pelabuhan Tanjung Emas pada bulan Februari 2025;
 - c. Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru – Batulicin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Dua Samudera Perkasa tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Setangga pada Pelabuhan Kota Baru Nomor : HK.201/01/09/KSOP.KBBL-2025 dan Nomor : 025/DSP-EXT/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;
 - d. Rapat Penilaian Konsep Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar dengan BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar pada tanggal 17 April 2025;
 - e. Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT Pelabuhan Buana Reja tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja di Pelabuhan Satui Nomor HK.201/1/1/KSOP.Satui-2025 dan Nomor 014/PBR-DIR/V/2025 tanggal 15 Mei 2025;
 - f. Pembahasan draft penyesuaian/novasi perjanjian konsesi perusahaan terminal Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan pada tanggal 29 Juni 2025;
 - g. Perjanjian Konsesi antara Kantor UPP Kelas I Sangkulirang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kementerian Perhubungan RI dengan PT Biru Arnawama Timur tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Di Perairan



Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor AL.301/34/5/UPP.SKG/2025 dan Nomor 88/PKS-WTDP/VII/DOK.25 pada tanggal 11 Juli 2025;

- h. Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kementerian Perhubungan RI dengan PT Pelabuhan Talenta Bumi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Talenta Bumi di Pelabuhan Banjarmasin Nomor HK.201/01/20/KSPOP.BJM-2025 dan Nomor 001/ADN/PTB/VIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025;
 - i. Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas I Palembang dengan BUP PT Benua Laut Lepas tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2025.
 - j. Pembahasan konsep addendum perjanjian konsesi PT Dua Samudera Perkasa pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di perairan Tanjung Pemancingan Prov Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Oktober 2025;
 - k. Pembahasan rancangan perjanjian konsesi perusahaan WTDP di Perairan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan pada tanggal 13 November 2025;
 - l. Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar dengan PT Pelabuhan Lembar Sejahtera tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar Nomor KU.204/01/01/KSOP.Lbr/2025 dan Nomor 004/MOU/PELTRA/Xii/2025 tanggal 4 Desember 2025.
4. Penyelenggaraan kerja sama teknis di Bidang Maritim;
- a. 11th Port Management Programme pada bulan juli 2025
 - b. Menyelenggarakan *Workshop on International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code* secara *hybrid* tanggal 20-21 Agustus 2025.
 - c. Menyelenggarakan *Port State Control (PSC) Mutual Inspection Training Course* secara *hybrid* pada tanggal 26-27 Agustus 2025.
 - d. Menyelenggarakan *Workshop on Vessel Inspection According to the International Bulk Chemical (IBC) Code* secara *hybrid* 16-17 September 2025.
 - e. Menyelenggarakan *Workshop on Vessel Inspection according to the International Maritime Solid Bulk Cargo (IMSBC) Code* secara *hybrid* pada tanggal 23 September 2025.
 - f. Menyelenggarakan *Workshop on Refresher Training Course for VTS Operator IALA V-103/5* secara *hybrid* tahun 2025 pada bulan Oktober 2025.



5. Penyusunan naskah perjanjian kerja sama dengan instansi terkait, sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Pelayaran Nomor : HK.201/2/23/DJPL/2025 dan Nomor : PJ.01/12/2/3/DGKP/UTMA/PLND-25 tanggal 12 Februari 2025;
 - b. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) bulan Maret 2025;
 - c. Evaluasi dan Rencana Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal dengan Kejaksaan Agung bulan April 2025;
 - d. Pembahasan draft perjanjian kerja sama direktorat perkapalan dan kepelautan dan dinas perikanan kabupaten jepara tanggal 22 Mei 2025;
 - e. Audiensi dan pembahasan perjanjian kerja sama antara ditjen hubla dengan gerakan ingat selamat layar indonesia tentang penyelenggaraann dukungan penelitian dan pengembangan di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut tanggal 30 Juni 2026;
 - f. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Jepara pada bulan Juli 2025;
 - g. Amandemen Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2025 (Penugasan PT PELNI (Persero)) pada bulan Agustus 2025;
 - h. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran di Pelabuhan Patimban pada bulan September 2025;
 - i. Pembahasan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Perhubungan tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang transportasi dan sosial pada tanggal 1 Oktober 2025;
 - j. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal infrastruktur Digital dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Sinergitas Interkoneksi Sistem Layanan Perizinan di Bidang Maritim Nomor 06/DJID.4/SP.02.04/12/2025 dan HK.201/12/8/DJPL/2025 tanggal 18 Desember 2025.
6. Penyusunan naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan BMN di Lingkungan Ditjen Hubla, sebagai berikut:
 - a. Pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Kantor KSOP Kelas II Benoa dengan PT. Easybook pada bulan Februari 2025;



- b. Perjanjian antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Sewa Barang Milik Negara (BMN) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon berupa Bangunan Dermaga di Pelabuhan Ambon Nomor PL.001/1/1/KSOP-AMB.2025 dan Nomor PP.01/3/3/2/B2.2/GM/AMBN-25 tanggal 27 Maret 2025;
 - c. pembahasan tindak lanjut rencana kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN pada kantor UPP Kelas II Tual tanggal 8 Mei 2025;
 - d. Perjanjian Hibah Masuk Antara Pemerintah Kab Sinjai Prov Sulsel Dengan Ditjen Hubla RI Tentang Hibah BMD Berupa Tanah Milik Pemerintah Kab Sinjai Kepada Ditjen Hubla pada Bulan Juli 2025;
 - e. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI dengan PT Transporindo Nusantara Terminal tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unir Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub RI pada bulan September 2025;
 - f. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi dengan PT Pelabuhan Lembar Sejahtera tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi pada Bulan November 2025.
7. Menghadiri sidang internasional, regional, dan bilateral, sebagai berikut:
- a. Menghadiri Sidang IMO *Legal Committee* (LEG) secara *hybrid* pada tanggal 24-28 Maret 2025, London, Inggris
 - b. Menghadiri Sidang IMO *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) ke-83 secara *hybrid* pada tanggal 7 – 11 April 2025, London, Inggris.
 - c. Menghadiri Sidang IMO *Council* ke-134 pada tanggal 7 – 11 Juli 2025, London, Inggris.
 - d. Menghadiri Sidang *Marine Environment Protection Committee* (MEPC/ES.2) – *2nd extraordinary session* pada tanggal 14-17 Oktober 2025, London, Inggris.
 - e. Menghadiri Rangkaian Sidang Dewan IMO ke-135, Majelis IMO ke-34, dan Dewan IMO ke-136, 19 November s.d. 4 Desember 2025, London, Inggris.
8. Penyusunan bahan kerja sama luar negeri dan pertemuan sidang internasional di Indonesia;
- a. Penyiapan bahan pada pertemuan dengan *French Embassy* di Jakarta yang membahas isu terkait *Global Port Safety Project*;
 - b. Membantu Penyiapan bahan *Courtesy Meeting on UK-Indonesia Sustainable Infrastructure Partnership and UK Partnering for Accelerated Climate Transition* di Jakarta;



- c. Penyiapan bahan pada pertemuan *Indonesia-Australia Marine Environment Coordination and Planning Meeting (MECPM)* ke-7 pada tanggal 29 April 2025 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta;
- d. Penyiapan bahan pada pertemuan dengan delegasi Rusia tanggal 15 April 2025 di OP Room Kementerian Perhubungan;
- e. Membantu penyiapan penyelenggaraan *the 1st Indonesia Maritime Week (IMW)* tahun 2025 tanggal 26-28 Mei 2025 di Jakarta.
- f. Membantu penyiapan bahan *Courtesy Call* dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia kepada Menteri Perhubungan tanggal 20 Agustus 2025 di Wisma Tamu, Jakarta.
- g. Membantu penyiapan bahan pada Pertemuan *the 3rd Indonesia - the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Working Group on Transportation* tanggal 15-16 September 2025 di Jakarta.
- h. Membantu penyelenggaraan *the Joint Seminar Indonesia Bangladesh: Ship Recycling under the Hong Kong Convention* tanggal 16 s.d. 18 September 2025 di Jakarta.
- i. ASEAN DEFA ke-14, kegiatan training on trainer (T.O.T) IMO Model Course 6.09 dan Trainer of Examiner (T.O.E) IMO Model Course 3.12 bagi negara-negara anggota Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA), 6 Oktober – 2 November 2025, Jakarta.
- j. Perundingan Joint Initiative on Services domestic Regulation (J-SDR) di VTO tanggal 20 November 2025
- k. 60th ASEAN Senior transport Officials Meeting (STOM) and Associated Meetings dan the 31st ASEAN Transport Ministers (ATM) and Associated Meetings 17 s.d. 20 November pleno IUNCF Jakarta 21 November 2025
9. Pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan IMO periode 2026-2027;
 - a. Melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri guna membahas strategi pemenangan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2026-2027 pada bulan Agustus 2025;
 - b. Persiapan Penyelenggaraan Resepsi Diplomatik RI di Jakarta dan di London pada tanggal 23 Oktober 2025;
 - c. Menyelenggarakan Resepsi Diplomatik RI di London, 25 November 2025.
10. Penyelenggaraan workshop penyusunan bahan sidang luar negeri;
 - a. Menyelenggarakan *Workshop* Penyusunan Bahan Sidang IMO *Legal Committee* (LEG) secara *hybrid* pada tanggal 24-28 Maret 2025, London, Inggris;
 - b. Menyelenggarakan *Workshop* Penyusunan Bahan Sidang IMO *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) ke-83 secara *hybrid* pada bulan Mei 2025;



- c. Menyelenggarakan *Workshop* Penyusunan Bahan Sidang *IMO Council* ke-134 pada tanggal 7 – 11 Juli 2025, London, Inggris;
- d. Menyelenggarakan workshop penyusunan bahan Sidang Dewan IMO ke-135, Majelis IMO ke-34, dan Dewan IMO ke-136, 19 November s.d. 4 Desember 2025, London, Inggris.
11. Pemenuhan kontribusi tahunan pada organisasi internasional;
 - a. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembayaran kontribusi tahunan Indonesia pada organisasi *International Organization for Marine Aids to Navigation* (IALA) pada bulan Januari 2025;
 - b. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembayaran kontribusi tahunan Indonesia pada Tokyo MoU pada bulan Mei 2025;
12. Penyelenggaraan pertemuan IMO GLO-FOULING Project;
 - Menyelenggarakan pertemuan *3rd Global Project Task Force Meeting of the Glofouling Partnership Project* (GPTF), 10 s.d. 12 Maret 2025 di Bali.
13. Penyelenggaraan pertemuan bilateral bidang maritim (pada tahun 2025 tidak dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran);
14. Pelaksanaan IMSAS
Pelaksanaan *IMO Member State Audit Scheme* (IMSAS) pada tanggal 16 s.d 23 Juni 2025 di Kantor Kementerian Perhubungan

5.4.3 Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk Persentase Perjanjian Kerja Sama Bidang Transportasi Laut Yang Disepakati sebesar 100% dan capaian Triwulan I dan Triwulan II terhadap target sebesar 100%. Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 5.4.3) terdapat 1 (satu) Kegiatan dengan 12 rencana pelaksanaan, yaitu Penyusunan Bahan Perjanjian Internasional yang disepakati. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun *Instrument of Extension for the Memorandum of Understanding* (MoU) *Training DGST-MPA* pada bulan Januari 2025;
2. Menyampaikan tanggapan akhir terhadap Draf MoU antara Indonesia dengan Belanda mengenai saling pengakuan sertifikat pelaut pada bulan Februari 2025;
3. Menyusun Draf Memorandum of Cooperation (MoC) antara Indonesia dengan *International Maritime Organization* (IMO) mengenai Partisipasi *IMO Member State Audit Scheme* (IMSAS) pada bulan Maret 2025.



4. Penandatanganan *Memorandum of Cooperation (MoC)* antara Indonesia dengan *International Maritime Organization (IMO)* mengenai Partisipasi *IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)* pada bulan April 2025.
 5. Penandatanganan MoU antara Kementerian Perhubungan dan *Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherland* terkait Pengakuan Sertifikat Pelaut pada bulan mei 2025.
 6. Melakukan komunikasi dengan Brunei Darussalam terkait rencana penandatanganan MoU pada bulan Juni 2025.
 7. Memberikan tanggapan dan masukan terhadap *MoU on Cooperation in the Field of Transport* antara RI dan Malaysia pada bulan Juli 2025.
 8. Penukaran MoU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Maritime and port Authority of Brunei Darussalam *concerning in the Field of Mercant Shipping and Port Operation* pada bulan Agustus 2025.
 9. Memberikan tanggapan terhadap usulan MoU antara Dewan Maritim Federasi Rusia dan Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia pada bulan September 2025.
 10. Pembahasan catatan/correctiv action plan terkait hasil technical mission, pembahasan rencana perpanjangan MoU dengan IALA pada bulan Oktober 2025
 11. Pembahasan Dokumen initial Memorandum Bidang Biotechnology Development and Chemical Utilization pada LI Nomor : 0502, 0446, 0230, 01111 dan 0285 pada bulan November 2025
- Penandatanganan MoU antara DJPL dan IALA terkait Kerja Sama Bidang Keselamatan Maritim pada bulan desember 2025

5.4.4 Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk Persentase Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Bidang Transportasi Laut sebesar 100% dari target 1 rencana pelaksanaan. Pada Triwulan II terealisasi sebesar 1 pelaksanaan yaitu Penyusunan Ratifikasi Konvensi Internasional / Perjanjian Internasional Bidang Pelayaran terkait terselenggaranya kegiatan Permohonan pembahasan ulang usulan keanggotaan pada *international organization for marine aids to navigation (IOMAN)*, sehingga persentase pencapaian target sebesar 100%

5.4.4 Persentase Keterlibatan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Kerjasama Internasional

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 untuk Persentase Keterlibatan Kesekretariatan DJPL Dalam Kerjasama Internasional sebesar 100% dan capaian Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terhadap target sebesar 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



1. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Sub-Committee on Pollution Prevention and Response* (PPR) ke-12, 27-31 Januari 2025, London, Inggris;
2. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping* (HTW) ke-11, 10-14 Februari 2025 London, Inggris;
3. Menyusun bahan Sidang *IMO Legal Committee* (LEG), 24-28 Maret 2025, London, Inggris.
4. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Marine Environment Protection Committee* (MEPC) ke-83 secara *hybrid* pada tanggal 7 – 11 April 2025, London, Inggris;
5. Membantu penyusunan bahan Sidang *Technical Cooperation Committee* (TC) ke-75 secara *hybrid* pada tanggal 2 – 6 Juni 2025, London, Inggris;
6. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Maritime Safety Committee* (MSC) ke-110 secara *hybrid* pada tanggal 18 - 27 Juni 2025, London, Inggris.
7. Membantu penyusunan bahan Sidang *IMO Council* ke-134 secara *hybrid* pada tanggal 7 – 11 Juli 2025, London, Inggris.
8. Membantu penyusunan bahan Sidang *Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments* (III) ke-11 secara *hybrid* pada tanggal 21 - 25 Juli 2025, London, Inggris.
9. Membantu penyusunan bahan Sidang *Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers* (CCC) ke-11 secara *hybrid* pada tanggal 8 – 12 September 2025, London, Inggris.
10. Membantu penyusunan bahan Sidang *Marine Environment Protection Committee* (MEPC/ES.2) – 2nd extraordinary session, secara *hybrid* pada tanggal 14-17 Oktober 2025, London, Inggris.
11. Membantu penyusunan bahan Sidang *Council* secara *hybrid* pada tanggal 19 – 21 November 2025, London, Inggris;
12. Membantu penyusunan bahan Sidang *Assembly dan Council* 136 secara *hybrid* pada tanggal 24 November – 4 Desember 2025.



Optimis

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KABAG PERENCANAAN	13/01/25	A.
2	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN		A
3	KABAG SUMBER DAYA MANUSIA	14/1/25	A.
4	KABAG BAGIAN HUKUM DAN KSLN	15/1/25	89
5	KABAG ORGANISASI DAN HUMAS	13/01/25	off
6	KABAG KEUANGAN	15/1/25	18

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 1	Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata Kelola unit kerja yang baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase kecukupan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	%	100
		IKK 2	Persentase keandalan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	%	92,5
		IKK 3	Persentase layanan bantuan hukum	%	100
		IKK 4	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	%	100
		IKK 5	Persentase monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%	100
		IKK 6	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%	100
		IKK 7	Persentase pencapaian PNBP	%	100
		IKK 8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	94

		IKK 9	Persentase layanan internal	%	100
		IKK 10	Persentase kegiatan pendukung	%	100
		IKK 11	Persentase penyelesaian penyusunan NSPK	%	100
SK 2	Meningkatnya dukungan manajemen terhadap kualitas tata Kelola unit kerja yang baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 12	Persentase layanan organisasi dan tata Kelola internal	%	100
		IKK 13	Persentase layanan manajemen SDM	%	100
		IKK 14	Persentase pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%	100
		IKK 15	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM lingkungan DJPL	%	100
		IKK 16	Persentase layanan perkantoran	%	100
		IKK 17	Persentase layanan umum	%	100
		IKK 18	Persentase layanan perencanaan	%	100

		IKK 19	Persentase layanan anggaran	%	100
		IKK 20	Persentase layanan pemantauan dan evaluasi	%	100
		IKK 21	Persentase layanan kehumasan	%	100
		IKK 22	Persentase layanan data dan informasi	%	100
		IKK 23	Persentase layanan hukum	%	100
		IKK 24	Persentase layanan kerjasama dan kemitraan	%	100
		IKK 25	Persentase perjanjian kerja sama bidang transportasi laut yang disepakati	%	100
		IKK 26	Persentase keterlibatan kesekretariatan DJPL dalam kerjasama internasional	%	100
		IKK 27	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	79,5
		IKK 28	Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yang disepakati	%	100
		IKK 29	Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) yang ditindaklanjuti	%	100

		IKK 30	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	82
		IKK 31	Nilai kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik	Nilai	3,8
		IKK 32	Persentase penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi bidang transportasi laut	%	100
		IKK 33	Persentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti	%	100
		IKK 34	Nilai AKIP Setditjen Hubla	Nilai	80
		IKK 35	Persentase publikasi informasi melalui media sosial	%	90

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
4. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 34.831.714.000,00-
Rp. 225.777.787.000,00-
Rp. 28.083.901.000,00-
Rp. 135.759.804.000,00-

Disetujui,

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001